



PEMERINTAH
KABUPATEN BOYOLALI

KUA PPAS

TAHUN 2025

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BUPATI BOYOLALI
DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 900/01970/2/2024
NOMOR : 900/1362/VIII/2024

Tanggal : 06 Agustus 2024

TERHADAP
KEBIJAKAN UMUM APBD DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN 2024



BERITA ACARA

Nomor : 900/01970/2/2024

Nomor : 900/1362/VIII/2024

KESEPAKATAN BERSAMA BUPATI BOYOLALI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

T E N T A N G

KEBIJAKAN UMUM APBD DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **MOHAMMAD SAID HIDAYAT** : Bupati Boyolali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Merdeka Barat, Siswodipuran, Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MARSONO** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
3. **F U A D I** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
4. **ALI HUFRONI** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.
5. **EKO MUJIONO** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali, yang beralamat di Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali Jl. Merdeka Utara, Siswodipuran, Boyolali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

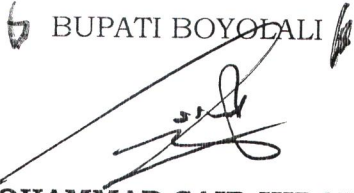
Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

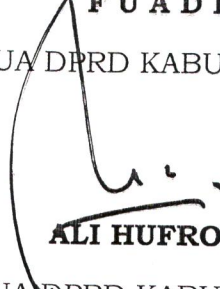
2. PIHAK PERTAMA menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan penyesuaian dan koreksi atas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
4. Selanjutnya Berita Acara ini sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Boyolali, 6 Agustus 2024


BUPATI BOYOLALI
f MOHAMMAD SAID HIDAYAT


KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI
MARSONO
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

FUADI
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

ALI HUFRONI
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

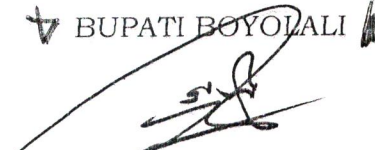
EKO MUJIONO

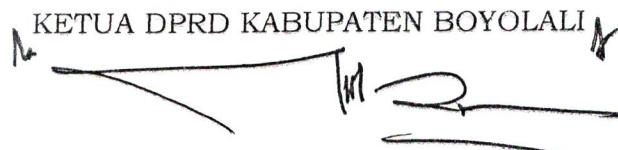
Lampiran : Berita Acara Kesepakatan Bersama
Bupati Boyolali dan DPRD
Kabupaten Boyolali.
Nomor : 900/01970/2/2024
Nomor : 900/1362/VIII/2024

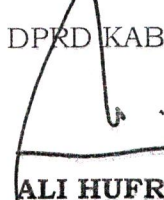
CATATAN REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN KEBIJAKAN UMUM APBD DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN BOYOLALI
TAHUN ANGGARAN 2025

Struktur Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten
Boyolali Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

A. Pendapatan Daerah :	
1. Semula	: Rp. 2.368.916.154.000,00
2. Bertambah	: Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan menjadi	: Rp. 2.368.916.154.000,00
B. Belanja Daerah :	
1. Semula	: Rp. 2.397.944.154.000,00
2. Bertambah	: Rp. 0,00
Jumlah Belanja menjadi	: Rp. 2.397.944.154.000,00
Defisit	: Rp. (29.028.000.000,00)
C. Pembiayaan Daerah :	
Penerimaan :	
1. Semula	: Rp. 55.000.000.000,00
2. Bertambah	: Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan menjadi	: Rp. 55.000.000.000,00
Pengeluaran	
1. Semula	: Rp. 25.972.000.000,00
2. Bertambah	: 0,00
Jumlah Pengeluaran menjadi	: Rp. 25.972.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 29.028.000.000,00
D. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	: Rp. 0,00

✓ BUPATI BOYOLALI

+ MOHAMMAD SAID HIDAYAT

KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

MARSONO
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

FUADI
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

ALI HUFRONI
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN BOYOLALI

EKO MUJIONO



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA)**

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025	1
B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025	25
C. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025	26
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	30
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	30
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	37
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)	41
A. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	41
B. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBD	42
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	46
A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.....	46
B. Target pendapatan daerah.....	49
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	51
A. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja	51
B. Rencana Belanja operasi, belanja modal, belanja Transfer dan belanja tidak terduga.....	76
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	77
A. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	77
B. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	78
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	80
BAB VIII PENUTUP.....	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Artinya bahwa penetapan kebijakan serta target pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan daerah dalam APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menentukan kualitas APBD. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan ketelitian tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar dokumen APBD yang tersusun dapat realitis, rasional dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Salah satu tahapan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA). Dari sisi legal, Pasal 310 ayat 1 Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini sejalan dengan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa dalam penyusunan KUA dan PPAS Kepala Daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini berarti bahwa proses penyusunan KUA harus mengikuti program dan kegiatan yang telah tercantum pada RKPD. Dengan kata lain, dokumen KUA harus searah dengan RKPD.



Secara substansi dokumen KUA Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk Tahun 2025. Dengan demikian, maka dokumen KUA Tahun 2025 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah Tahun Anggaran 2025 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui proses analisis teknokratik dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Selain itu, penyusunan KUA Tahun Anggaran 2025 juga memperhatikan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional. Melalui rangkaian proses penyusunan dokumen perencanaan dimaksud, diharapkan dapat terwujud dokumen KUA Tahun Anggaran 2025 yang implementatif dan akuntabel.

Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana jangka menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 mendasar pada RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025 di dalamnya memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintah daerah yang



disertai proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pendanaan disertai asumsi yang mendasarinya.

Kebijakan Umum APBD (KUA) diharapkan berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun, maka Kebijakan Umum Anggaran juga diharapkan menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yaitu menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

Pemerintah Daerah dalam menyusun prioritas pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi masing-masing dan kewenangan yang dimiliki, mengingat keberhasilan pencapaian pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah Provinsi yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025 selain memperhatikan regulasi formal (UU/PP/Perpres) dan kebijakan pembangunan nasional (RPJMN, RKP), juga tetap harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan sektoral baik nasional maupun daerah. Beberapa dokumen perencanaan multi sektor di tingkat nasional yang memiliki keterkaitan dengan dokumen RKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2025 yaitu: 1) Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 2) Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025; dan 3) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya RKPD Kabupaten Boyolali juga memperhatikan Dokumen Rancangan RKPD Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang memberikan arah program



strategis Jawa Tengah di Kabupaten/Kota serta dengan memperhatikan program strategis nasional di Jawa Tengah serta memanfaatkan competitiveness dan comparative advantage wilayah perbatasan dengan kabupaten/kota dan provinsi lain.

Arah kebijakan Periode Tahun 2025 merupakan langkah awal tahapan perencanaan pembangunan lima tahun kedepan yang merupakan peluang pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Tahapan periode tahun 2025 RPJMD Kabupaten Boyolali diwujudkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2025. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 Tahap IV menetapkan visi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN BOYOLALI YANG BERDAYA SAING, KONSTITUSIONAL, AMAN, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

Adapun visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pilkada Tahun 2020 adalah “BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI” Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL), yang terjemahkan dalam 5 (lima) misi antara lain:

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;
4. Boyolali Menghadirkan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya; dan
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

Arah kebijakan tahunan yang terdapat dalam RPJMD memandu sinkronisasi antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan. Arah kebijakan tahunan akan menjadi tema dan prioritas pembangunan dalam dokumen



RKPD. Perumusan arah kebijakan tahunan berbasis pada telaah urgensi isu/permasalahan pembangunan yang perlu direspon secara sistematis dan bertahap, serta dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD di akhir periode pembangunan. Arah Kebijakan/Tema Pembangunan tahun 2025 Kabupaten Boyolali adalah:

“Pemantapan tata kelola pemerintahan, serta SDM yang tangguh, cerdas berkarakter dan berbudaya”.

Tahun 2025 merupakan tahun pemantapan untuk pembangunan tata kelola pemerintahan dan SDM. Pemantapan berarti semakin memperkuat capaian pembangunan pada periode atau tahun sebelumnya. Prioritas pembangunan pada 2025 antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penerapan standar pelayanan di seluruh perangkat Daerah
2. Penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan
3. Peningkatan kapasitas keuangan Daerah dengan berbagai terobosan untuk meningkatkan PAD
4. Pembangunan pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan ASN yang semakin profesional
5. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
6. Pendidikan yang semakin berkualitas, inklusif, dan merata
7. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan anak
8. Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan dengan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana publik
9. Pelestarian dan pengembangan budaya benda dan tak benda, baik untuk tujuan edukasi, penguatan kerukunan masyarakat, dan peningkatan perekonomian.

Guna mendukung program pengentasan kemiskinan, penurunan stunting dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), di Kabupaten Boyolali, berikut beberapa *cross cutting* program yang terdapat dalam RPJMD 2021-2026:

Tabel Cross Cutting Pengentasan Kemiskinan, Penurunan

Stunting dan PPRG

Cross Cutting	Program	Indikator Kinerja	OPD
Kemiskinan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penyediaan fasilitas buang air besar/bersama-sama bagi rumah tangga miskin (program kemiskinan)	Dinas Kesehatan
		Jumlah warga miskin yang mendapatkan bantuan pembiayaan sebagai peserta JKN Kis (premi non DTKS)	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		APM SMP	
		Persentase warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (SPM)	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Prosentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang layak	DPUPR
	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Prosentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap sanitasi yang layak	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar di luar panti (SPM)	Dinas Sosial
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial	
	Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menjalankan kebijakan pengentasan kemiskinan	Dispermasdes
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase penyediaan data sektoral yang berkualitas	Diskominfo
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase kesesuaian tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja	Diskopnaker
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	



	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang terlatih	Disdagperin
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Korban bencana/relokasi	DPKP
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh	
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh	
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luasan lahan terkena bencana yang tertangani (Program kemiskinan)	Dinas Pertanian
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian dalam Kondisi Baik	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktifitas pertanian per ha/tahun	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentasi Stimulus bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah desa/kelurahan yang tepat sasaran di lingkup kecamatan(program kemiskinan)	KECAMATAN
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Sekretariat Daerah
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perusahaan yang mengelola air limbah sesuai ketentuan	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase sumber emisi yang memenuhi baku mutu	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase cakupan area pelayanan sampah	
		Persentase sampah yang dikelola dengan 3R	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan ketersediaan benih ikan	Dinas Peternakan dan Perikanan
Stunting	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan yang aktif	DP2KBP3A

	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase peserta KB aktif	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita stunting	Dinas Kesehatan
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase promosi konsumsi ikan yang berhasil dijalankan	Dinas Peternakan dan Perikanan

Sumber : Olah Data Bapperida Kab Boyolali, Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Tahun 2024-2026. Tujuan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah adalah “Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari” yang akan dicapai dengan empat sasaran pembangunan daerah meliputi:

- a. meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing, dan berkelanjutan, dengan fokus kepada:
 - 1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah;
 - 2) Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar;



- 3) Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas;
 - 4) Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi;
 - 5) Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan keterampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran;
- b. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif, dengan fokus kepada:
- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat yang inklusif dan merata melalui perluasan akses layanan pendidikan berbasis pada identifikasi pemetaan kebutuhan dan pendataan yang akurat, serta cakupan pembiayaan pendidikan terutama bagi siswa miskin, Anak Tidak Sekolah (ATS), serta inklusi; peningkatan tata kelola pendidikan didukung dengan penguatan koordinasi secara lintas stakeholder, serta optimalisasi peran fungsi instansi/lembaga/satuan pendidikan dan masyarakat; peningkatan kualitas kebijakan melalui penguatan kerangka regulasi berorientasi pada akses mutu dan relevansi



pendidikan yang berpihak pada kelompok rentan termasuk ATS;

- 2) Meningkatkan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan pemenuhan prasarana dan sarana, pemenuhan jumlah dan distribusi Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan secara bertahap, penyusunan kebijakan, perbaikan baseline data, pemenuhan SOP; pemberdayaan masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan; penguatan implementasi digitalisasi layanan di fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang terhubung dengan sistem layanan provinsi; identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM kesehatan; peningkatan dukungan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular khususnya malaria dan DBD, penyakit tidak menular khususnya jantung dan stroke, masalah kesehatan jiwa serta Kejadian Luar Biasa (KLB)/krisis kesehatan; pemetaan kapasitas fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam pemberian layanan prioritas untuk perluasan cakupan kesehatan semesta; revitalisasi pelaksanaan pemanfaatan pekarangan untuk pemenuhan gizi keluarga; serta pendampingan keluarga dalam penyediaan dan pengolahan pangan bergizi dan berkualitas;
- 3) Meningkatkan penyadaran dan peningkatan literasi masyarakat untuk hidup bugar, penyediaan ruang terbuka publik ramah aktivitas olahraga, serta pemetaan potensi atlet;
- 4) Meningkatkan dan memperluas akses layanan literasi dengan pemetaan dan pendataan yang valid;
- 5) Meningkatkan jiwa kepemimpinan, kepeloporan, serta pemberdayaan pemuda;



- 6) Meningkatkan nilai-nilai budaya masyarakat melalui pemeliharaan nilai agama dan kearifan lokal, peningkatan ketersediaan data dan informasi kebudayaan yang akurat, peningkatan tata kelola kebudayaan, serta penguatan koordinasi, fasilitasi dengan kabupaten/kota, dan sinergi dengan pemerintah pusat;
 - 7) Meningkatkan pembangunan berbasis gender melalui peningkatan kontribusi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek dengan didukung ketersediaan data pilah gender;
 - 8) Meningkatkan ketahanan keluarga dengan penurunan kekerasan berbasis gender, serta meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak melalui fasilitasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) kabupaten/kota, penguatan jejaring penyelenggaraan pelayanan terpadu milik Provinsi, peningkatan pemahaman aparat mengenai penanganan restoratif bagi pelaku dan korban kekerasan berbasis gender, pendidikan anti kekerasan sejak usia dini, pencegahan perkawinan anak melalui intervensi lintas sektor, peningkatan kualitas penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), serta peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dengan fokus kepada:
- 1) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui peningkatan pemantauan terhadap badan air dan kualitas udara ambien, penyediaan sarana prasarana pengolah limbah dan persampahan (TPST Regional, TPS 3R, IPAL Komunal),



peningkatan pengawasan terhadap sumber pencemar air dan udara, peningkatan kapasitas kelembagaan konservasi partisipatif multipihak dan rehabilitasi hutan dan lahan berbasis DAS dengan peran aktif masyarakat, peningkatan kepatuhan penatausahaan hasil hutan, penguatan dan kepatuhan kelembagaan perhutanan sosial, peningkatan edukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, peningkatan upaya adaptasi perubahan iklim pada lokasi super prioritas kerentanan iklim, penguatan sinergi implementasi pembangunan rendah karbon, dan penyusunan perencanaan tata ruang, serta optimalisasi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;

- 2) Peningkatkan ketahanan energi untuk mewujudkan transisi energi yang terjangkau dan inklusif melalui pengembangan energi berkelanjutan, perluasan akses untuk masyarakat terhadap listrik dan energi, serta edukasi masyarakat tentang pemanfaatan energi alternatif;
- 3) Meningkatkan ketahanan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian sumber daya air secara berkelanjutan, peningkatan konservasi air tanah melalui pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air tanah mengacu pada peta zona konservasi Cekungan Air Tanah (CAT) Jawa Tengah, serta pembangunan sarana prasarana konservasi air tanah, pengembangan SPAM Regional, serta pengurangan luasan genangan banjir, penanganan rob, dan degradasi pesisir;
- 4) Menurunkan risiko bencana melalui penyediaan kebijakan penanggulangan bencana dan dokumen perencanaan penanggulangan bencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota, peningkatan kapasitas Sumber Daya



Manusia dalam penanggulangan bencana, perluasan kemitraan untuk mobilisasi sumber daya penanggulangan bencana, peningkatan dukungan kabupaten/kota untuk penyediaan sumber literasi kebencanaan, sistem peringatan dini/*Early Warning System (EWS)*, pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana, serta satuan pendidikan aman bencana (SPAB), pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang inklusif, peningkatan kesiapan klaster penanggulangan bencana Provinsi dan Kabupaten/Kota, penyusunan kebijakan mekanisme transfer risiko dalam pengurangan kerugian akibat bencana, penyusunan kebijakan perlindungan sosial adaptif, serta penguatan kebijakan pengendalian penduduk utamanya di wilayah risiko bencana tinggi; dan

d. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis, dengan fokus kepada:

- 1) Mewujudkan birokrasi yang adaptif termasuk didalamnya penyempurnaan peta proses bisnis pemerintahan berbasis teknologi informasi, evaluasi struktur organisasi berdasarkan peta proses bisnis, pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, penataan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi, memetakan kesenjangan kompetensi dan kinerja, penyelenggaraan pengembangan kompetensi tematik, serta penguatan manajemen organisasi berbasis risiko dan riset didukung dengan penyediaan data pembangunan berbasis teknologi informasi;
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang kolaboratif melalui perluasan jejaring dan kerja sama antarpemerintah, dan pemerintah dengan lembaga nonpemerintah.



Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Selain itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil pelaksanaan Reses juga menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Boyolali. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Boyolali sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2025 meliputi:

1. Bidang infrastruktur antara lain : Pembangunan dan rehabilitasi jalan, Sarana air bersih, Pembangunan jalan usaha tani, Penataan lingkungan, Perbaikan irigasi, Drainase Jalan, Bantuan rumah tidak layak huni;
2. Bidang non infrastruktur antara lain : Bantuan modal usaha, Pelatihan budidaya pertanian, Prasarana penanganan bencana, Sarana prasarana pertanian, Bantuan ternak, Sarana prasarana difabel, Sarana prasarana sanitasi, Sarana prasarana sosial, Sarana prasarana Teknologi informatika, Sarana prasarana olahraga.

Penanganan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi sehingga upaya penanggulangan kemiskinan juga memerlukan pelibatan seluruh pemangku kepentingan dan bersifat lintas sektor. Upaya ini tidak hanya melibatkan pihak pemerintah (K/L dan Pemerintah Daerah), tetapi juga pihak non-pemerintah (organisasi masyarakat, dunia usaha dan perguruan tinggi). Oleh sebab itu, efektivitas penanggulangan kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kebijakan dan program oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) sebagai *coordination hub* dalam sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Penanganan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Boyolali tahun 2023 antara lain:



1. Jemput bola rekam KTP pada ODGJ, disabilitas, dan lansia sejumlah 115 warga Th 2023;
2. Pengajuan dan penerbitan akta kematian berbasis RT untuk penghapusan data sejumlah 13.175 pada tahun 2023;
3. Pemberian jaminan PBI kesehatan yang tepat sasaran sejumlah 128.377 sasaran atau sebesar Rp29.210.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sepuluh juta rupiah);
4. Penanganan ODGJ Tunawisma, dari 2.928 Tertangani 1.302;
5. *Hospital whithout Wall*, Akses dr spesialis bagi masyarakat miskin serta *Early Warning System (EWS)*;
6. Aksi Boyolali Sejahtera BAZNAS Kabupaten Boyolali Tahun 2023 sebesar Rp10.684.736.936,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan 14.677 penerima manfaat, melalui 5 Program :
 - a) Boyolali Peduli, jadup Rp860.820.000,00 (delapan ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1.193 penerima manfaat, renovasi RTLH Kebencanaan Rp159.947.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk 27 penerima manfaat, renovasi RTLH usulan Desa/Kelurahan Rp1.235.686.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) untuk 187 penerima manfaat, santunan yatim Rp73.335.000,00 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 153 penerima manfaat, paket sembako Rp90.913.740,00 (sembilan puluh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) untuk 503 penerima manfaat, santunan kebencanaan Rp45.750.000,00



(empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 54 penerima manfaat, pemasangan listrik Rp36.100.000,00 (tiga puluh enam juta seratus ribu rupiah) untuk 24 penerima manfaat, khitan masal Rp96.043.000,00 (sembilan puluh enam juta empat puluh tiga ribu rupiah) untuk 100 penerima manfaat, bantuan dipan dan kasur lansia Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) untuk 25 penerima manfaat, pemulangan orang terlantar Rp9.091.050,00 (sembilan juta sembilan puluh satu ribu lima puluh rupiah) untuk 39 penerima manfaat, bantuan air bersih Rp33.213.750,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), donasi Palestina Rp162.464.651,00 (seratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh empat ribu enam ratus lima puluh satu rupiah), bantuan kebencanaan lainnya Rp191.497.400,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).

- b) Boyolali Sehat, bantuan penanganan stunting Rp211.373.622,00 (dua ratus sebelas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh dua rupiah) untuk 411 penerima manfaat, bantuan biaya pengobatan Rp980.740.380,00 (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) untuk 388 penerima manfaat, jamban sehat Rp119.875.000,00 (seratus sembilan belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 96 penerima manfaat, pemasangan sambungan PDAM Rp88.320.000,00 (delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) untuk 50 penerima manfaat, bantuan kaki palsu Rp18.350.000,00 (delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 5 penerima



manfaat, bantuan kursi roda Rp28.405.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah) untuk 23 penerima manfaat.

- c) Boyolali Cerdas, bantuan biaya kuliah Rp75.750.000,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 51 penerima manfaat, bantuan siswa SMPN Rp637.200.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1.818 penerima manfaat, bantuan siswa SDN Rp795.350.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3.181 penerima manfaat, bantuan siswa sekolah swasta Rp166.000.000,00 (seratus enam puluh enam juta rupiah) untuk 472 penerima manfaat, bantuan pembayaran tunggakan sekolah Rp29.909.700,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu tujuh ratus rupiah) untuk 14 penerima manfaat, bantuan siswa MTS/MAN Rp385.208.500,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) untuk 1.382 penerima manfaat.
- d) Boyolali Makmur, bantuan alat pertukangan Rp164.065.774,00 (seratus enam puluh empat juta enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) untuk 77 penerima manfaat, bantuan alat masak warung makan Rp82.451.559,00 (delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) untuk 69 penerima manfaat, bantuan alat perbengkelan Rp53.884.394,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) untuk 23 penerima manfaat, bantuan gerobak angkringan Rp87.677.500,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk 43 penerima manfaat, bantuan gerobak lainnya Rp98.635.000,00 (sembilan puluh



delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) untuk 43 penerima manfaat, etalase warung Rp35.900.000,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 21 penerima manfaat, bronjong/rombong motor Rp28.250.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 27 penerima manfaat, mesin jahit Rp81.411.500,00 (delapan puluh satu juta empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) untuk 31 penerima manfaat, alat cukur rambut Rp18.015.973,00 (delapan belas juta lima belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) untuk 15 penerima manfaat, alat cuci motor/mobil Rp4.262.332,00 (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) untuk 3 penerima manfaat, alat laundry Rp23.241.001,00 (dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu satu rupiah) untuk 9 penerima manfaat, z chicken Rp93.281.810,00 (sembilan puluh tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah) untuk 10 penerima manfaat, alat usaha lainnya Rp61.379.779,00 (enam puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah) untuk 45 penerima manfaat, ternak kambing Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) untuk 59 penerima manfaat, ternak lainnya Rp15.250.000,00 (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 12 penerima manfaat, bantuan alat tangkap nelayan Kedungombo Rp31.189.500,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk 43 penerima manfaat, modal usaha Rp152.591.600,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) untuk 139 penerima manfaat.



- e) Boyolali Taqwa, bantuan masjid/mushola Rp101.625.000,00 (seratus satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk 42 penerima manfaat, bantunan kegiatan keagamaan Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) untuk 7 kegiatan, bantuan sarana dakwah Rp76.528.100,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah) untuk 31 penerima manfaat, bantuan guru/ustadz Rp772.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk 1.574 penerima manfaat, kegiatan pesantren Ramadhan Rp165.542.500,00 (seratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk 321 penerima manfaat, pemberdayaan mualaf Rp64.369.500,00 (enam puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) untuk 113 penerima manfaat, pelatihan merawat jenazah Rp25.075.600,00 (dua puluh lima juta tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) untuk 159 penerima manfaat, hidangan berkah ramadhan Rp28.970.000,00 (dua puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebanyak 3.000 paket, paket ramadhan bahagia Rp325.391.560,00 (tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk 1.401 penerima manfaat, kegiatan dakwah lainnya Rp420.295.000,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk 107 penerima manfaat.
7. Pemberian insentif RT/RW sejumlah Rp13.910.400.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tahun 2023 oleh Dispermasdes;
8. Peningkatan Kualitas RTLH Tahun 2023 yang terbagi dalam:



- a). Program Kawasan Permukiman dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak huni target 200 unit dan pagu anggaran sebesar : Rp3.060.000.000,00 (tiga miliar enam puluh juta rupiah) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni target 30 unit dan pagu anggaran Rp1.071.000.000,00 (satu miliar tujuh puluh satu juta rupiah),
 - b). Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha target 1.378 Unit dan Pagu Rp21.177.000.000,00 (dua puluh satu miliar seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
9. Bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas sebesar Rp99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk 31 penerima manfaat \; Bantuan ternak kambing bagi anak terlantar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk 15 penerima manfaat; Bantuan ternak kambing bagi gelandangan pengemis sebesar Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk 11 penerima manfaat; Bantuan sandang (peralatan sekolah) bagi anak terlantar sebesar Rp86.732.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) untuk 100 penerima manfaat; Bantuan sembako bagi anak terlantar sebesar Rp80.212.500,00 (delapan puluh juta dua ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) untuk 75 penerima manfaat, Bantuan peralatan usaha bagi peserta pelatihan PMKS sebesar Rp99.750.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 50 PM; Bantuan bed bagi ODGJ sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk



6 penerima manfaat, Bantuan sembako bagi lansia terlanjar (2 tahap) sebesar Rp399.900.000,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk 200 penerima manfaat; Bantuan sembako bagi ODGJ sebesar Rp69.965.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk 70 PM; Bantuan sembako bagi ODKB sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk 160 PM; Bantuan BLT bagi petani/buruh Tembakau yang bersumber dari dana DBHCHT sebesar Rp3.232.800.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2.694 PM; Bantuan logistik bagi korban bencana alam/sosial Rp243.300.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 685 PM; Bantuan hibah bagi KUBE sebesar 2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) untuk 210 kube (2.100) orang; Beasiswa kuliah bagi keluarga miskin sebesar Rp712.000.000,00 (tujuh ratus dua belas juta rupiah) untuk 89 orang; Bantuan Sosial Kesehatan untuk warga miskin (BTT BKD) 10 tahap sebesar Rp20.986.547.702,00 (dua puluh miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua rupiah) untuk 2.135 PM; Bansos Orang Kehabisan Bekal sebesar 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 4 PM; Bantuan bagi korban rumah terbakar dan roboh sebesar 18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk 9 orang.

Program kegiatan yang dilaksanakan OPD dalam menangani pengentasan kemiskinan di Kabupaten Boyolali antara lain:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan → program pengelolaan Pendidikan sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Pendidikan;



2. Dinas Perumahan dan Kawasan → Permukiman → program Kawasan Permukiman Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Luas di Bawah 10 Ha sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu rumah tinggal/papan;
3. DPUPR → program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu rumah tinggal/papan;
4. Dinas Kesehatan → program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan;
5. Dinas Lingkungan Hidup → program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan;
6. Dinas Sosial → program perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan dengan parameter kemiskinan MCD yaitu pakaian/sandang;
7. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja → program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan dengan parameter kemiskinan MCD yaitu penghasilan;
8. Dinas Ketahanan Pangan → program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan dengan parameter kemiskinan MCD yaitu kebutuhan akan konsumsi/pangan;
9. Dinas Kominfo → program penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan parameter kemiskinan MCD yaitu Kesehatan dengan parameter kemiskinan MCD yaitu informasi;



10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa → program administrasi pemerintahan desa dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Jumlah desa yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan).

Penanganan Stunting

Dalam upaya penanggulangan Stunting Pemerintah Kabupaten Boyolali merumuskan beberapa langkah strategis antara lain:

1. Pemanfaatan Satu Data dalam penanggulangan Stunting di Kabupaten Boyolali;
2. Penggunaan Dana Desa untuk program penanggulangan stunting di Desa yang didukung dengan Regulasi;
3. Peran PKK di semua kegiatan Pokja dalam rangka penanggulangan stunting;
4. Peningkatan integritas kegiatan dalam mencapai cakupan keluarga yang mendapat bantuan;
5. Optimalisasi peran TJSLP / CSR dalam penanganan stunting;
6. Peningkatan peran semua forum berbasis masyarakat dalam kelompok peduli stunting;
7. Optimalisasi peran Rumah Sakit dalam sistem rujukan dalam penanganan dan tata laksana masalah gizi (stunting).

Inovasi Daerah

Dalam bidang inovasi daerah dalam rangka mendukung salah satu misi Bupati Boyolali yaitu Boyolali tersenyum, tumbuh, mandiri dan berdaya saing perlu mendorong semua OPD untuk melakukan inovasi dalam berbagai aspek sesuai dengan kewenangannya. Saat ini sudah dilakukan inventarisasi inovasi dari berbagai OPD baik yang berasal dari inovasi OPD, PNS (Proyek Perubahan) CPNS (Rancangan Aktualisasi) dan Masyarakat melalui *Platform* Satu Data Inovasi Boyolali pada Aplikasi Bi-Smart (Boyolali *Innovation*



System Management of Research and Technology) yang selanjutnya akan dilakukan verifikasi inovasi untuk mematangkan inovasi sebelum ditetapkan menjadi inovasi daerah sesuai yang diamanatkan Perda Nomor 17 tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Dengan ditetapkannya sebagai inovasi daerah, maka keberlangsungan dan ketersediaan anggaran untuk keberlangsungan penerapan dan pemanfaatan inovasi diharapkan akan lebih terjamin. Adapun inovasi daerah dimaksud dapat berbentuk inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, maupun inovasi lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan inovasi yang berasal dari masyarakat baik umum (termasuk ASN, BUMD/N, OPD) maupun pelajar dan mahasiswa, yang dijangkit melalui lomba krenova, berkesempatan mendapatkan fasilitasi lanjutan antara lain berupa fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan penyertaan pameran yang berdampak pada perluasan akses pasar, selain itu untuk menumbuhkan iklim inovasi Kabupaten Boyolali juga menerbitkan Jurnal Inovasi Daerah agar inovasi di Kabupaten Boyolali dapat disebarluaskan. Selain itu juga diadakan penghargaan terhadap inovasi PD dalam bentuk lomba Pekan Inovasi Boyolali (PINBOY) dengan parameter indikator inovasi daerah dalam rangka persiapan mengikuti *Inovation Government Award* yang diadakan Pemerintah Pusat.

Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good governance*) terintegrasi pada prioritas pembangunan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Boyolali juga berupaya mempertahankan capaian Korpsurgah KPK, TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan), Indeks Survey Penilaian Integritas, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Reformasi Birokrasi (RB). Selain itu, reformasi birokrasi dan tata kelola mencakup pola kerja pegawai, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian yang



lebih memanfaatkan teknologi informasi, pengembangan sistim pengendalian intern, inovasi dan efisiensi anggaran diantaranya *e-planning*, *e-budgeting*, e-PL, sistem informasi manajemen kepegawaian yang tersinkronisasi dengan kinerja dan presensi, *e-audit*, *review* pendampingan dan Siskeudes.

B. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, KUA memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian. Kebijakan Umum APBD merupakan pedoman bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Boyolali dengan Bupati Boyolali.

Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Kebijakan Umum APBD periode tahapan keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah dicapai pada tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 serta masalah dan tantangan yang akan dihadapi pada pelaksanaan KUA tahun 2025, maka ditetapkan tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD tahun anggaran 2025.
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 yang rasional dan realistis



yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025.

3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2025.
4. Menyusun pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh OPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
5. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2025 agar berdayaguna dan berhasil guna.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.
7. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

C. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005–2025;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);



16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024; dan
19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

1. Arah Kebijakan Nasional

Arah kebijakan nasional diambil dari Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu:

- 1) Transformasi Sosial
Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan, dan perlindungan sosial.
- 2) Transformasi Ekonomi
Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.
- 3) Transformasi Tata Kelola
Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil.
- 4) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi.
- 5) Ketahanan Sosial Budaya
Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

2. Kondisi Perekonomian Daerah

a. Pertumbuhan ekonomi

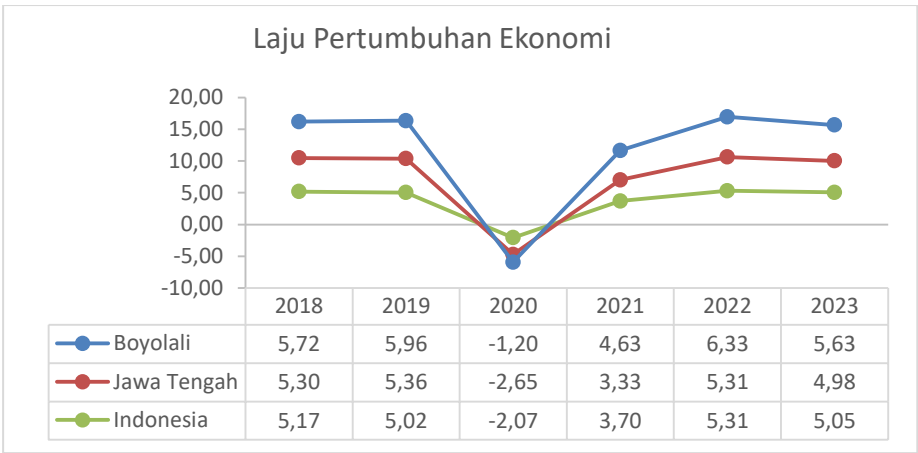
Kondisi perekonomian Boyolali ditopang oleh lima sektor lapangan usaha, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Transportasi dan Pergudangan. Kondisi ekonomi makro di Kabupaten

Boyolali ini tidak terlepas dari sektor pertanian sebagai basis ekonomi utama.

Pro Investasi adalah bagian dari Visi Misi, tetapi program penanganan kemiskinan (pronangkis) adalah bagian yang terpenting dari upaya *recovery* atau pemulihan ekonomi dari Pandemi Covid-19. Adalah tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Boyolali sekarang ini untuk segera keluar dari dampak Pandemi Covid-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Dapat dikatakan bahwa kabupaten Boyolali sudah keluar dari dampak pandemi Covid-19, hal ini dapat dilihat pertumbuhan ekonomi yang terus naik setelah kontraksi di tahun 2020 akibat covid-19 dengan pertumbuhan ekonomi dibawah nol (minus 1,20) dan mulai tahun 2021 sampai 2023 terus merangkak positif dan menyentuh angka 5,63 bahkan ditahun 2022 menyentuh angka 6,33 yang merupakan angka pertumbuhan tertinggi di subosukowonsraten dan diatas pertumbuhan Jawa Tengah maupun Nasional.

Secara terinci, perkembangan capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dalam lima tahun terakhir (2019-2023) tersaji pada uraian grafik berikut:

Laju Pertumbuhan Ekonomi Boyolali Tahun 2018-2023



Sumber: Statistic Indonesia, Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Boyolali dilihat dari indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Adapun kondisi perkembangan PDRB Kabupaten Boyolali Tahun 2019

sampai Tahun 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dapat dilihat, tabel berikut:

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023

Tahun	PDRB ADHB		PDRB ADHK	
	Nilai (Juta Rupiah)	(%) Pertumbuhan	Nilai (Juta Rupiah)	(%) Pertumbuhan
2019	32.665.981,16	7,96	22.681.097,81	5,96
2020	32.696.289,90	0,09	22.409.732,64	-1,20
2021	34.906.160,78	6,76	23.447.366,01	4,63
2022	38.814.934,12	11,20	24.931.304,74	6,33
2023	42.735.552,79	10,10	26.334.296,33	5,63

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2024

PDRB ADHB Wilayah Subosukawonosraten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

KABUPATEN/ KOTA/ PROVINSI	PDRB ADHB (dalam juta rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. BOYOLALI	32.665.981,16	32.696.289,90	34.906.160,78	38.814.934,12	42.735.552,79
2. KLATEN	39.766.522,78	39.945.640,38	42.295.255,88	46.613.428,71	51.274.190,00
3. SUKOHARJO	36.945.880,36	36.890.533,42	38.990.458,19	42.819.990,00	46.521.250,00
4. WONOGIRI	29.044.917,06	29.165.548,14	30.580.892,45	33.699.420,00	36.942.650,00
5. KARANGANYAR	37.014.752,03	37.023.453,39	39.158.453,93	43.116.960,00	47.203.550,00
6. SRAGEN	37.836.230,82	37.850.990,68	40.087.775,48	42.280.477,06	48.570.130,00
7. SURAKARTA	47.999.714,41	47.621.820,53	50.371.564,19	55.964.800,00	60.485.760,00
JAWA TENGAH	1.360.960.130,98	1.347.922.689,03	1.420.799.908,38	1.560.899.020,00	1.696.795.420,00

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali,Tahun 2024

PDRB ADHB Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023 sebesar Rp. 42.735.552,79 (empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh dua koma tujuh puluh sembilan rupiah) berada pada posisi ke – 6 se Wilayah Subosukawonosraten.

PDRB ADHK Wilayah Subosukawonosraten dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

KABUPATEN/ KOTA/ PROVINSI	PDRB ADHK (dalam juta rupiah)				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. BOYOLALI	22.681.097,81	22.409.732,64	23.447.366,01	24.931.304,74	26.334.296,33
2. KLATEN	27.805.993,69	27.480.359,39	28.531.108,64	30.214.981,95	31.938.326,59
3. SUKOHARJO	27.076.442,63	26.616.503,11	27.634.117,53	29.185.360,00	30.661.920,00
4. WONOGIRI	20.856.209,49	20.563.144,42	21.251.003,92	22.447.730,00	23.566.880,00
5. KARANGANYAR	26.599.744,09	26.103.228,36	27.034.107,96	28.619.990,00	30.208.240,00
6. SRAGEN	26.853.059,12	26.367.261,24	27.355.145,96	28.929.808,57	30.442.240,00
7. SURAKARTA	35.441.107,67	34.815.965,32	36.211.248,26	38.475.990,00	40.620.310,00
JAWA TENGAH	991.516.543,31	965.225.709,06	997.317.097,26	1.050.322.130,00	1.102.563.180,00

Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2024

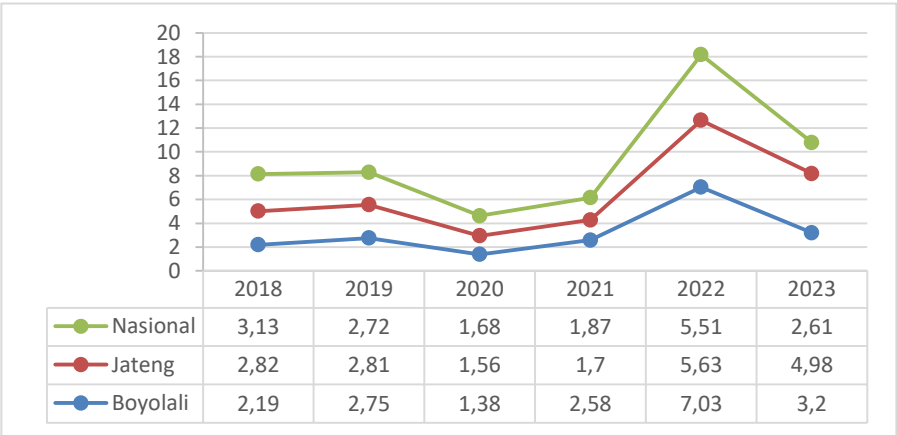
PDRB ADHK Kabupaten Boyolali pada Tahun 2023 sebesar Rp. 26.334.296,33 (dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam koma tiga puluh tiga rupiah) berada pada posisi ke – 6 se eks Karesidenan Surakarta.

b. Inflasi

Inflasi adalah besarnya perubahan harga barang dan jasa secara rata-rata yang mencakup ratusan komoditas yang dikonsumsi masyarakat. Indikator ini menunjukkan tingkat stabilitas perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. Inflasi yang rendah dan terkendali merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, karena kegiatan produksi barang dan jasa berlangsung sesuai hukum pasar yang berlaku dan dapat diprediksi sifat dan perilakunya di pasar.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Boyolali cenderung fluktuatif, yang dipengaruhi oleh berbagai indikator pemicu inflasi baik yang bersifat internal maupun eksternal antara lain disebabkan meningkatnya permintaan atau kebutuhan masyarakat, meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat, meningkatnya biaya-biaya produksi barang atau jasa, kenaikan cukai rokok, biaya listrik. Adapun perkembangan inflasi di Boyolali dapat dilihat pada tampilan berikut;

Laju Inflasi Boyolali Tahun 2018-2023



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2024

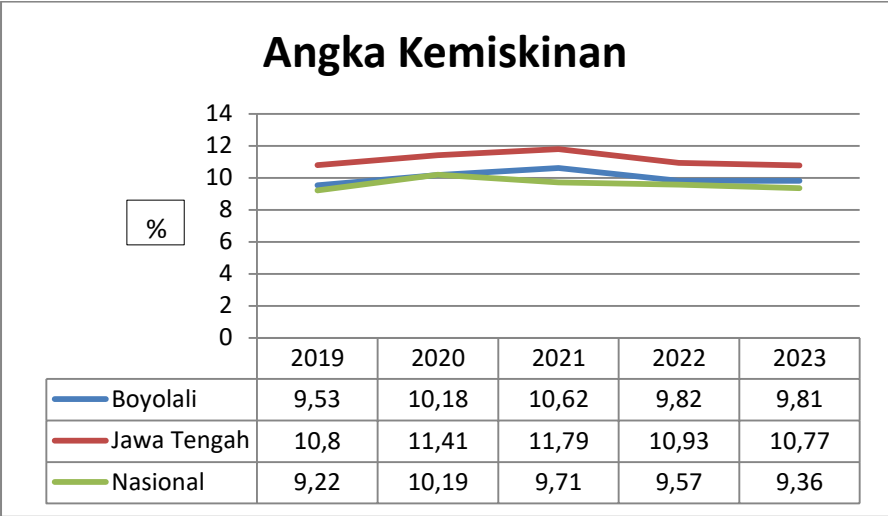
c. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja Sejak 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Boyolali selalu lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Provinsi dan Nasional. Namun pada tahun 2020 TPT Kabupaten Boyolali meningkat menjadi 5,28 persen akibat dampak pandemi Covid-19, dan pada tahun 2021 mulai berkurang karena mulai terdapat pemulihan ekonomi. Pada tahun 2023 terjadi penurunan TPT menjadi 4,05 %. Perkembangan TPAK dan TPT di Kabupaten Boyolali Tahun 2018-2022 adalah sebagaimana table berikut:

No.	Tahun	TPAK	TPT
1	2019	72.70	3,09
2	2020	75,11	5,28
3	2021	75,79	5,09
4	2022	75,51	4,92
5	2023	74,73	4,05

Sumber: BPS Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2024

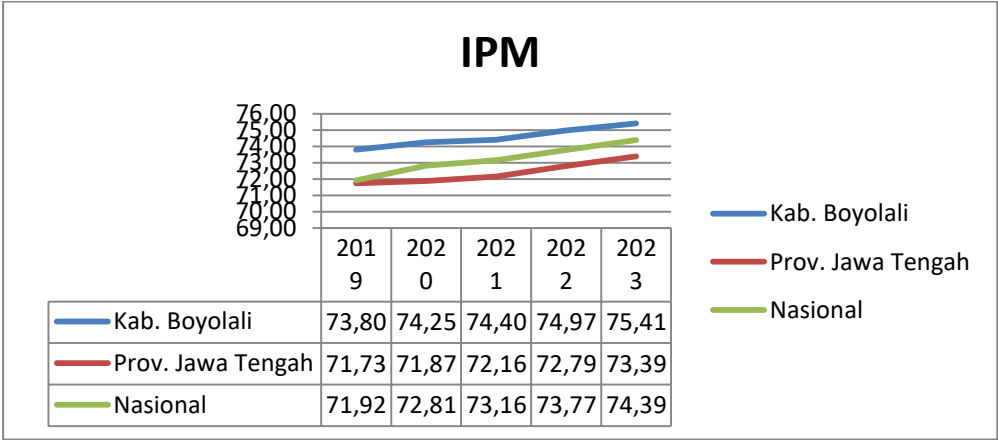
Angka kemiskinan Kabupaten Boyolali tahun 2023 sebesar 9,81 persen, angka kemiskinan Kabupaten Boyolali mengalami penurunan 0,01 persen dibandingkan dengan tahun 2022, meskipun demikian masih di bawah angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional (Sumber Data : BPS, 2023). Sedangkan menurut data *Monitoring Centre of Development* (MCD) Kabupaten Boyolali, angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali Tahun 2023 sebesar 6,68 persen (per 31 Oktober 2023). Angka Kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2018 – 2022 pada grafik berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2024

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Boyolali secara umum mengalami kemajuan yang konsisten selama periode 2019 hingga 2023. IPM Kabupaten Boyolali konstan selalu di atas IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Boyolali telah mencapai angka 75,41, sedangkan Provinsi 73,39 dan Nasional 74,39. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Boyolali Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Sumber: BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2024

Perbandingan IPM kabupaten/kota di Wilayah Subosukawonosraten tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali berada di bawah Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar dan Klaten, serta berada di atas Kabupaten Sragen dan Wonogiri..

Perbandingan tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut:

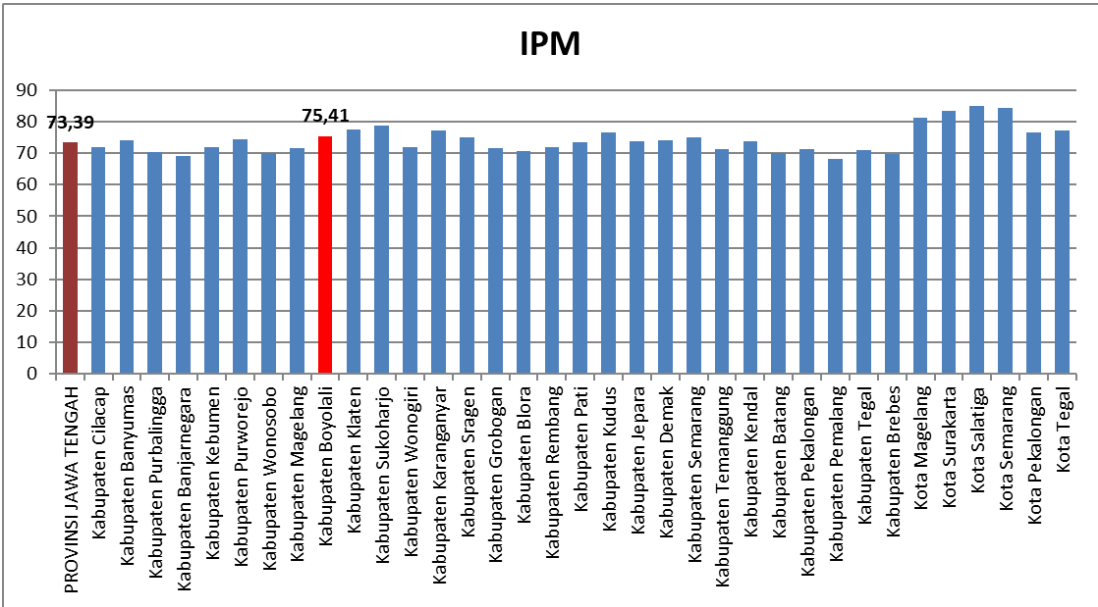
Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Wilayah Subosukawonosraten Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Boyolali	73,80	74,25	74,40	74,97	75,41
Kab. Klaten	75,29	75,56	76,12	76,95	77,59
Kab. Sukoharjo	76,84	76,98	77,13	77,94	78,65
Kab. Wonogiri	69,98	70,25	70,49	71,04	71,97
Kab. Karanganyar	75,89	75,86	75,99	76,58	77,31
Kab. Sragen	73,43	73,95	74,08	74,65	75,10
Kota Surakarta	81,86	82,21	82,62	83,08	83,54

Sumber : BPS Kabupaten Boyolali, Tahun 2024

Nilai IPM Kabupaten Boyolali Tahun 2023 menduduki peringkat 5 di wilayah Subosukawonosraten, sedangkan bila dibandingkan nilai IPM kabupaten/kota di Jawa Tengah, tahun 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Boyolali duduk di peringkat ke-12.

IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2023



Sumber : BPS, Tahun 2023

Indikator pembentuk IPM di Kabupaten Boyolali terdiri dari Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan.

e. Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Boyolali tahun 2023 sebesar 636.730 orang dengan rincian 610.950 orang adalah penduduk yang bekerja (95,95 persen) sedangkan jumlah pengangguran terbuka sebesar 25.780 orang atau 4,05 persen. Dengan jumlah penduduk usia kerja di Kabupaten Boyolali sebanyak 851.900 orang, maka didapat angka partisipasi Angkatan kerja sebesar 74,73 persen.

Prosentase pencari kerja yang ditempatkan tahun 2023 sebesar 77,97 persen. Prosentase angka penyelesaian perselisihan pengusaha dan pekerja di tahun 2023 sebesar 90 persen. Ada 10 Kasus di perselisihan hubungan industrial di Kabupaten Boyolali, dapat diselesaikan sebanyak 9 kasus dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja dan dibuat Perjanjian Bersama, sedangkan 1 kasus masih proses sidang mediasi. Rasio penduduk yang bekerja pada Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Perkembangan Ketenagakerjaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2019-2023**

No	Uraian	201	202	202	2022	2023
1.	Penduduk yang Bekerja (%)	96,9	94,7	94,9	95,08	95,95
2.	Penduduk yang Tidak Bekerja (%)	3,09	5,28	5,09	4,92	4,05
3.	Angka partisipasi kerja (%)	72,7	75,1	72,3	75,51	74,73

Sumber data: Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Boyolali dan BPS, Tahun 2024

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan pada Tahun 2023 sebesar Rp2.444.305.229.951,00 (dua triliun empat ratus empat puluh empat miliar tiga ratus lima juta dua ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah). Untuk Tahun Anggaran 2024 anggaran pendapatan ditargetkan sebesar Rp2.354.349.113.000,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh empat miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah) sedangkan pada Tahun 2025 mendatang pendapatan diproyeksikan sebesar

Rp2.368.916.154.000,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Realisasi Pendapatan Tahun 2023, Target Pendapatan Tahun 2024 dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Realisasi Pendapatan Tahun 2024,
Target Pendapatan Tahun 2024, dan Proyeksi
Pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun 2025**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
4	Pendapatan Daerah	2.444.305.229.951,00	2.354.349.113.000,00	2.368.916.154.000,00
4.1	Pendapatan Asli Daerah	494.473.199.784,00	466.535.912.000,00	556.989.713.000,00
4.1.01	Pajak daerah	182.483.741.975,00	180.000.000.000,00	248.363.463.000,00
4.1.02	Retribusi daerah	17.516.387.575,00	252.197.948.000,00	275.209.969.000,00
4.1.03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	23.240.383.323,00	22.623.530.000,00	22.571.300.000,00
4.1.04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	271.232.686.911,00	11.714.434.000,00	10.844.981.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.943.020.083.167,00	1.887.813.201.000,00	1.811.926.441.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.745.533.158.413,00	1.712.813.201.000,00	1.705.797.441.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	197.486.924.754,00	175.000.000.000,00	106.129.000.000,00

Sumber: BKD & Bapperida Kab. Boyolali, Tahun 2024 (Realisasi Tahun 2023 Audited)

**Rekapitulasi Realisasi dan Prediksi Keuangan,
dan Kerangka Pendanaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2023-2024 dengan Proyeksi Tahun 2025**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Anggaran Tahun Berjalan (2024)	Proyeksi/Target pada Tahun Rencana 2025
1	PENDAPATAN	2.444.305.229.951,00	2.354.349.113.000,00	2.368.916.154.000,00
2	BELANJA	2.026.442.161.445,00	2.402.349.113.000,00	2.397.944.154.000,00
3	PEMBIAYAAN	138.285.469.819,00	48.000.000.000,00	29.028.000.000,00

Sumber: BKD & Bapperida Kab. Boyolali, Tahun 2024 (Realisasi Tahun 2023 Audited)

2. Belanja Daerah

Realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp 2.026.442.161.445,00 (dua triliun dua puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh lima rupiah). Target Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.402.349.113.000,00 (dua triliun empat ratus dua miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu rupiah), sedangkan Tahun Anggaran 2025 anggaran belanja direncanakan sebesar Rp2.397.944.154.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah). Realisasi belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2023, target belanja 2024 dan 2025 tersaji pada tabel berikut ini:

Realisasi Belanja Tahun 2023, Target Belanja Tahun 2024 dan Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
5	BELANJA	2.026.442.161.445,00	2.402.349.113.000,00	2.397.944.154.000,00
5.1	Belanja Operasi	1.559.193.022.284,00	1.589.755.023.000,00	1.674.327.770.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	914.044.381.109,00	905.874.654.000,00	972.358.297.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	533.563.259.960,00	561.423.445.000,00	607.005.033.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	74.351.638.715,00	102.140.124.000,00	72.688.140.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	37.233.742.500,00	20.316.800.000,00	22.276.300.000,00
5.2	Belanja Modal	453.924.865.491,00	384.190.816.000,00	238.740.933.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.438.098.494,00	7.049.111.000,00	5.000.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	111.153.641.092,00	57.006.022.000,00	43.471.968.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	182.322.750.909,00	140.772.734.000,00	74.348.910.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	147.107.737.578,00	171.255.941.000,00	108.472.487.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.731.632.918,00	7.857.008.000,00	7.397.568.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	171.004.500,00	250.000.000,00	50.000.000,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	13.324.273.670,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	13.324.273.670,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	409.440.287.000,00	418.403.274.000,00	474.875.451.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	409.440.287.000,00	19.509.795.000,00	25.781.972.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	398.893.479.000,00	449.093.479.000,00

Sumber: BKD & Bapperida Kab. Boyolali, Tahun 2024 (Realisasi Tahun 2023 Audited)

3. Pembiayaan Daerah

Realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp159.785.469.819,00 (seratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah). Untuk Tahun Anggaran 2024 penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Sedangkan Realisasi pengeluaran pembiayaan Tahun 2023 sebesar Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah). Untuk Tahun Anggaran 2024 pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2023-2025

No	Uraian	Realisasi Tahun 2023	Target Tahun 2024	Proyeksi Tahun 2025
6	Pembiayaan	138.285.469.819,00	48.000.000.000,00	29.028.000.000,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	159.785.469.819,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	159.785.469.819,00	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	21.500.000.000,00	7.000.000.000,00	25.972.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	21.500.000.000,00	7.000.000.000,00	25.972.000.000,00

Sumber: BKD & BAPPERIDA Kab. Boyolali, Tahun 2024 (Realisasi Tahun 2023 Audited)

Dalam komponen Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025 sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) direncanakan dari Silpa Tahun 2024 sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah), sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2025 direncanakan penyertaan modal sebesar Rp25.972.000.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Badan Usaha Milik Daerah.



BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

A. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Tahun 2025 adalah awal dari RPJMN Tahun 2025-2029, dan RPJMN 2025-2029 adalah sangat strategis yang menjadi bagian dari awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 Indonesia Emas. Pada tahun 2025 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,3-5,6 persen. Selain itu pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6-7 persen serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,5-5 persen.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" memiliki 8 (delapan) Agenda Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi;
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola;
4. Memantapkan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan;
7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan;
8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.



B. Asumsi dasar yang digunakan dalam RAPBD

1. Pendapatan

Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali dalam menyusun perencanaan APBD Tahun 2025 dengan target pendapatan daerah Tahun 2025 meliputi:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara total diprediksikan akan mengalami kenaikan dibanding target yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2024. Prediksi kenaikan ada pada pos pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan daerah yang dipisahkan.
- b. Pendapatan Transfer diasumsikan berkurang dari alokasi APBD Tahun 2024.

Landasan yang digunakan dalam menerapkan asumsi tersebut adalah:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa dalam hal alokasi pendapatan transfer belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maka penganggaran pendapatan transfer dialokasikan berdasarkan tahun sebelumnya;

Prediksi Pendapatan pada Tahun 2025 sebesar Rp 2.368.916.154.000,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah). Adapun proyeksi pendapatan Kabupaten Boyolali Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:



Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali
Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		APBD TA 2024	APBD TA 2025	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.354.349.113.000,00	2.368.916.154.000,00	14.567.041.000,00	0,62
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	466.535.912.000,00	556.989.713.000,00	90.453.801.000,00	19,39
4.1.01	Pajak Daerah	180.000.000.000,00	248.363.463.000,00	68.363.463.000,00	37,98
4.1.02	Retribusi Daerah	252.197.948.000,00	275.209.969.000,00	23.012.021.000,00	9,12
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.623.530.000,00	22.571.300.000,00	(52.230.000,00)	(0,23)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.714.434.000,00	10.844.981.000,00	(869.453.000,00)	(7,42)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.887.813.201.000,00	1.811.926.441.000,00	(75.886.760.000,00)	(4,02)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.712.813.201.000,00	1.705.797.441.000,00	(7.015.760.000,00)	(0,41)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	175.000.000.000,00	106.129.000.000,00	(68.871.000.000,00)	(39,35)

Sumber: BKD & BAPPERIDA Kab. Boyolali, Tahun 2024

2. Belanja

Prediksi alokasi belanja pada Tahun 2025 sebesar Rp 2.397.944.154.000,00 (dua triliun tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), secara total Belanja akan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan APBD Tahun 2024. Komposisi belanja pada Tahun 2025 sesuai PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang secara keseluruhan mengalami kenaikan dibanding APBD TA 2024 namun demikian terdapat penurunan pada Belanja hibah;
- b. Belanja Modal mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD TA 2024;
- c. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan masih sama dengan APBD TA 2024;
- d. Belanja Transfer meliputi Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan Pemerintahan Desa.

Adapun proyeksi belanja Kabupaten Boyolali pada rancangan APBD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali
Tahun 2025

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		APBD TA 2024	APBD TA 2025	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	BELANJA DAERAH	2.402.349.113.000,00	2.397.944.154.000,00	(4.404.959.000,00)	(0,18)
5.1	BELANJA OPERASI	1.589.755.023.000,00	1.674.327.770.000,00	84.572.747.000,00	5,32
5.1.01	Belanja Pegawai	905.874.654.000,00	972.358.297.000,00	66.483.643.000,00	7,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.423.445.000,00	607.005.033.000,00	45.581.588.000,00	8,12
5.1.05	Belanja Hibah	102.140.124.000,00	72.688.140.000,00	(29.451.984.000,00)	(28,83)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.316.800.000,00	22.276.300.000,00	1.959.500.000,00	9,64
5.2	BELANJA MODAL	384.190.816.000,00	238.740.933.000,00	(145.449.883.000,00)	(37,86)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.049.111.000,00	5.000.000.000,00	(2.049.111.000,00)	(29,07)
5.2.02	Belanja Modal PeralatandanMesin	57.006.022.000,00	43.471.968.000,00	(13.534.054.000,00)	(23,74)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.772.734.000,00	74.348.910.000,00	(66.423.824.000,00)	(47,19)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.255.941.000,00	108.472.487.000,00	(62.783.454.000,00)	(36,66)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.857.008.000,00	7.397.568.000,00	(459.440.000,00)	(5,85)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0
5.4	BELANJA TRANSFER	418.403.274.000,00	474.875.451.000,00	56.472.177.000,00	13,50
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.509.795.000,00	25.781.972.000,00	6.272.177.000,00	32,15
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	398.893.479.000,00	449.093.479.000,00	50.200.000.000,00	12,58

Sumber: BKD & BAPPERIDA Kab. Boyolali, Tahun 2024

3. Pembiayaan Daerah

Dalam komponen Penerimaan Pembiayaan yang diproyeksikan pada rancangan APBD Tahun 2025 sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Nilai tersebut berasal dari proyeksi SILPa tahun 2024 tidak terikat yang dapat dijabarkan Tahun 2025 sebesar Rp 55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan pada

APBD Tahun 2025 sebesar Rp 25.972.000.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) berasal dari penyertaan modal kepada BUMD.

Proyeksi pembiayaan Kabupaten Boyolali tahun 2025 tersaji pada berikut ini:

Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2025

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	
		APBD TA 2024	APBD TA 2025	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
6	PEMBIAYAAN DAERAH	48.000.000.000,00	29.028.000.000,00	(18.972.000.000,00)	(39,53)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.000.000.000,00	55.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	25.972.000.000,00	(18.972.000.000,00)	271,03
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	25.972.000.000,00	(18.972.000.000,00)	271,03
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0

Sumber: BKD & BAPPERIDA Kab. Boyolali, Tahun 2024



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) merupakan dasar dari tahapan penyusunan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) setelah DPRD mendapat bahan dari pemerintah daerah hasil dari Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan).

Dalam membuat kebijakan memperhatikan kondisi yang telah terjadi dan perkiraan yang akan terjadi sebagaimana uraian sebelumnya, selain itu yang terpenting juga adalah kondisi makro nasional maupun kondisi regional Jawa Tengah akan menjadi perkembangan penting dalam menetapkan kebijakan pada KUA ini. Pada prinsipnya kebijakan adalah sesuatu yang harus dilakukan atau yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai pernyataan tersebut dalam satu tahun kedepan jelas sangat vital karena kebijakan tersebut sangat strategis dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

KUA Tahun 2025 memuat formulasi kebijakan anggaran yang akan dijadikan acuan dalam perencanaan operasional anggaran yang mencakup pendapatan, belanja tidak langsung, belanja langsung dan pembiayaannya.

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang akan dilakukan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025

Perencanaan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki



kapasitas dasar hukum penerimaannya. Struktur pendapatan tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat semakin berkurang. Salah satu isu yang menarik terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal adalah menyangkut peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD atau yang disebut dengan *taxing power*. Namun demikian, undang-undang mengamanatkan bahwa peningkatan PAD tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang menghambat pelayanan publik dan iklim dunia usaha.

Secara teoritis besar kecilnya potensi PAD pada suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi daerah yang bersangkutan, terutama pada sektor industri dan jasa. Sebab kedua sektor tersebut merupakan basis PAD yang sangat dominan. Dengan demikian, untuk mengestimasi besarnya PAD dan pertumbuhan PAD setiap tahunnya dapat digunakan asumsi pertumbuhan ekonomi daerah yang digunakan. Komponen PAD terdiri dari:

a. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- 1) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.



- 2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang mana realisasi pajak daerah Tahun Anggaran 2025 diasumsikan bisa melebihi realisasi Tahun 2024;

b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

c. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- 3) Hasil kerjasama daerah;
- 4) Jasa giro;
- 5) pendapatan bunga;
- 6) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- 7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) pendapatan denda pajak daerah;
- 9) Pendapatan denda retribusi daerah; dan
- 10) Pendapatan dari BLUD.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Penganggaran pendapatan transfer terdiri dari:

- a. **Transfer Pemerintah Pusat;**
- b. **Transfer Antar Daerah**

Pendapatan Transfer diasumsikan berkurang dengan alokasi pada APBD Tahun 2024. Landasan yang digunakan dalam menerapkan asumsi tersebut adalah:

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 yang menyebutkan bahwa dalam hal alokasi pendapatan transfer belum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maka penganggaran pendapatan transfer dialokasikan berdasarkan tahun sebelumnya;

3. **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

B. **Target Pendapatan Daerah**

Target pendapatan daerah Kabupaten Boyolali yang direncanakan pada Rancangan APBD Tahun 2025 meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Sesuai arah kebijakan tersebut, maka proyeksi pendapatan Kabupaten Boyolali tahun 2025 akan tampak pada tabel sebagai berikut:

**Proyeksi Pendapatan Kabupaten Boyolali
Tahun 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		APBD TA 2024	APBD TA 2025	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH	2.354.349.113.000,00	2.368.916.154.000,00	14.567.041.000,00	0,62
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	466.535.912.000,00	556.989.713.000,00	90.453.801.000,00	19,39
4.1.01	Pajak Daerah	180.000.000.000,00	248.363.463.000,00	68.363.463.000,00	37,98

4.1.02	Retribusi Daerah	252.197.948.000,00	275.209.969.000,00	23.012.021.000,00	9,12
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.623.530.000,00	22.571.300.000,00	(52.230.000,00)	(0,23)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	11.714.434.000,00	10.844.981.000,00	(869.453.000,00)	(7,42)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.887.813.201.000,00	1.811.926.441.000,00	(75.886.760.000,00)	(4,02)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.712.813.201.000,00	1.705.797.441.000,00	(7.015.760.000,00)	(0,41)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	175.000.000.000,00	106.129.000.000,00	(68.871.000.000,00)	(39,35)

Sumber: BKD & BAPPERIDA Kab. Boyolali, Tahun 2024



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Arah kebijakan belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,



pemerintah daerah memberikan perhatian maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan

dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi:

- 1) pendidikan;
- 2) kesehatan;
- 3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait

pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi:

- 1) tenaga kerja;
- 2) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pangan;
- 4) pertanahan;
- 5) lingkungan hidup;
- 6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- 7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 9) perhubungan;



- 10) komunikasi dan informatika;
- 11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- 12) penanaman modal;
- 13) kepemudaan dan olah raga;
- 14) statistik;
- 15) persandian;
- 16) kebudayaan;
- 17) perpustakaan; dan
- 18) kearsipan.
- 19) urusan pemerintahan pilihan

2. Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

- 1) kelautan dan perikanan;
- 2) pariwisata;
- 3) pertanian;
- 4) kehutanan;
- 5) energi dan sumber daya mineral;
- 6) Perdagangan;
- 7) perindustrian; dan
- 8) transmigrasi.

3. Unsur pendukung, meliputi:

- 1) sekretariat Daerah; dan
- 2) sekretariat DPRD.

4. Unsur penunjang, meliputi:

- 1) perencanaan;
- 2) keuangan;
- 3) kepegawaian;
- 4) pendidikan dan pelatihan;
- 5) penelitian dan pengembangan;
- 6) penghubung; dan
- 7) pengelolaan perbatasan daerah.

5. Unsur pengawas yaitu inspektorat;

6. Unsur kewilayahan, meliputi:



- 1) kabupaten/kota administrasi; dan
- 2) kecamatan.

7. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya, Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus SMART (*Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time*) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.



Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari Tahap III Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 dan tahun ke-5 Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026. Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih Tahun 2021-2026 mengusung “BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI ”Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL), yang terjemahkan dalam 5 (lima) misi antara lain:

1. Boyolali Meneruskan Pro Investasi, Maju, Sinergi dan Berkelanjutan;
2. Boyolali Sehat, Tangguh, Cerdas, Berkarakter dan Berbudaya;
3. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional;



4. Boyolali Menghadirkan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya;
5. Boyolali Tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing.

Struktur belanja daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek.

Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- 1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2023.
- 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Kepala



Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Berkaitan dengan itu, dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya, tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- 7) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsure perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada



masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.
- 2) Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN Non Pemkab Boyolali dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai



target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusinya terhadap pelaksanaan sub kegiatan.

- 3) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.



Kategori skema ganda, yaitu:

- a) Penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- b) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.

Kategori bukan skema ganda, yaitu:

- a) Masyarakat yang sudah mendaftar atau didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
- b) Penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dapat dijamin/dibayarkan biaya pelayanan kesehatannya oleh Pemerintah Daerah.
- c) Penduduk yang sudah pernah mendaftar/didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional, namun sudah tidak ditanggung/sudah dinonaktifkan oleh penanggungnya.
- d) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
- e) Penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program Jaminan



Kesehatan Nasional, seperti:

- Biaya *ambulance* peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari rumah kefasilitas kesehatan atau sebaliknya;
 - Biaya transportasi peserta dan pendamping kefasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Nasional;
 - Biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan keluar kota;
 - Manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- 6) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
- a) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- 7) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan



peningkatan kapasitas bagi:

- a) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b) pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - c) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 8) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 9) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 10) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 11) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggung jawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - d) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan



secara lumpsum.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

- 13) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- 14) Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - a) hadiah yang bersifat perlombaan;
 - b) penghargaan atas suatu prestasi;
 - c) beasiswa kepada masyarakat;
 - d) penanganan dampak social kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan



sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut, yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas bantuan keuangan daerah kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Boyolali menganggarkan Dana Desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Boyolali menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan



yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2024 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a) Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b) Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c) Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ditentukan lain oleh ketentuan peraturan;
 - memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi



pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
dan

- memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan social berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan social digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran,



pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hibah dalam bentuk barang/jasa dan bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk



pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

- b. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
- a) belanja modal tanah; belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin; belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal bangunan dan gedung; belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya; Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan



dalam kondisi siap dipakai.

- f) Belanja modal aset tidak berwujud; Belanja modal aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala



Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.



Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa merupakan Belanja Bagi Hasil.

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:



1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
- hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
- hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
- hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran



2025 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2025. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dapat dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil penerimaan pajak daerah provinsi. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2024, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2025, disalurkan kepada

pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2025. Belanja bagihasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

B. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya serta memperhatikan masalah dan prioritas pembangunan daerah proyeksi belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Proyeksi Belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2025

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		APBD TA 2024	APBD TA 2025	RP	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
5	BELANJA DAERAH	2.402.349.113.000,00	2.397.944.154.000,00	(4.404.959.000,00)	(0,18)
5.1	BELANJA OPERASI	1.589.755.023.000,00	1.674.327.770.000,00	84.572.747.000,00	5,32
5.1.01	Belanja Pegawai	905.874.654.000,00	972.358.297.000,00	66.483.643.000,00	7,34
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.423.445.000,00	607.005.033.000,00	45.581.588.000,00	8,12
5.1.05	Belanja Hibah	102.140.124.000,00	72.688.140.000,00	(29.451.984.000,00)	(28,83)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.316.800.000,00	22.276.300.000,00	1.959.500.000,00	9,64
5.2	BELANJA MODAL	384.190.816.000,00	238.740.933.000,00	(145.449.883.000,00)	(37,86)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7.049.111.000,00	5.000.000.000,00	(2.049.111.000,00)	(29,07)
5.2.02	Belanja Modal PeralatandanMesin	57.006.022.000,00	43.471.968.000,00	(13.534.054.000,00)	(23,74)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	140.772.734.000,00	74.348.910.000,00	(66.423.824.000,00)	(47,19)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	171.255.941.000,00	108.472.487.000,00	(62.783.454.000,00)	(36,66)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.857.008.000,00	7.397.568.000,00	(459.440.000,00)	(5,85)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00	50.000.000,00	(200.000.000,00)	(80,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0
5.4	BELANJA TRANSFER	418.403.274.000,00	474.875.451.000,00	56.472.177.000,00	13,50
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.509.795.000,00	25.781.972.000,00	6.272.177.000,00	32,15
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	398.893.479.000,00	449.093.479.000,00	50.200.000.000,00	12,58

Sumber: BKD & BAPPERIDA Kab. Boyolali, Tahun 2024

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2024. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah.

Dalam penerimaan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 diprediksikan Silpa sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima milyar rupiah) diperhitungkan dari acres belanja pegawai dan kemungkinan efisiensi pelaksanaan belanja Barang Jasa. Proyeksi penerimaan pembiayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Proyeksi Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2025**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	55.000.000.000,00
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.000.000.000,00

Sumber: BKD & BAPPERIDA Kab. Boyolali, Tahun 2024



B. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Penambahan penyertaan modal dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penguatan struktur permodalan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM), bagian laba bersih PUDAM yang layanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi

cakupan pelayanan PUDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat.

Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.

Dalam pengeluaran pembiayaan daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 akan dialokasikan sebesar Rp.25.972.000.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk penyertaan modal BUMD.

Proyeksi pengeluaran pembiayaan Kabupaten Boyolali Tahun 2025 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Proyeksi Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Boyolali
Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.972.000.000.00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal Daerah	25.972.000.000.00

Sumber: BKD & BAPPERIDA Kab. Boyolali, Tahun 2024



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Beberapa upaya yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi:
 - a. Peningkatan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - b. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
 - d. Optimalisasi pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah;
 - e. Operasionalisasi, Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - f. Memberikan insentif dan penghargaan kepada OPD yang berhasil mencapai atau melampaui target dalam satu tahun anggaran.
2. Dana Perimbangan yang meliputi:
 - a. Peningkatan koordinasi antara instansi pengelola pajak pemerintah dan pajak daerah;
 - b. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian yang mengelola DAK; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang meliputi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Asumsi-asumsi terkait prakiraan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025:

 - a. Diperkirakan masih ada peningkatan wajib pajak baru;
 - b. Semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak;
 - c. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah.



Strategi pencapaian pendapatan daerah Kabupaten Boyolali antara lain:

1. Fasilitas perpajakan melalui penerbitan insentif berupa hadiah bagi wajib pajak Lunas PBB;
2. Perluasan basis pajak dan tetap berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah
3. Peningkatan kepatuhan sukarela WP;
4. Pengawasan dan penegakan hukum yang berkeadilan;
5. Mendorong kemudahan investasi yang akan meningkatkan perekonomian daerah.
6. Melakukan inovasi pemasangan alat perekam data transaksi pada beberapa merchant seperti Restoran dan kafe secara intensif.

Dalam hal Rencana belanja Kabupaten Boyolali Tahun 2025 akan difokuskan pada penyelesaian Visi-Misi Kepala Daerah 2021-2026.

Dalam penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2024 sudah dilakukan mapping belanja sehingga Silpa sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) diperhitungkan hanya dari acres belanja pegawai dan kemungkinan efisiensi pelaksanaan belanja Barang Jasa lainnya. Sedangkan dalam pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan sebesar Rp25.972.000.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta rupiah) untuk penyertaan modal BUMD.



BAB VIII PENUTUP

Demikian Nota kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025, terhadap hal-hal yang dipandang prinsip akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan APBD Tahun 2025.

Boyolali, Agustus 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

MARSONO,SH

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT,SH



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

**PRIORITAS PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA
(PPAS)**

TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.....	1
B. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2025.....	2
C. Dasar Hukum Penyusunan PPAS APBD Tahun 2025.....	2
 BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH	 5
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN 2025	6
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025	9
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH	12
BAB VI PENUTUP	13



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025

Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mengacu pada Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen PPAS adalah program/kegiatan prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah (PD) untuk setiap program/kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya diatur secara lebih teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan dokumen PPAS Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025. PPAS memuat prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari Pemerintah Daerah terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025 serta prioritas belanja daerah lainnya.

Kebijakan Prioritas dan Plafon Anggaran berfungsi sebagai salah satu penentu kapabilitas dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah selama satu tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran juga diharapkan menunjang diterapkannya model anggaran berbasis kinerja, yaitu menekankan bahwa setiap alokasi biaya yang dikeluarkan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai.

B. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025

Tujuan penyusunan PPAS Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Menyelaraskan skala prioritas program dan agenda pembangunan daerah Kabupaten Boyolali dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dan penganggaran;
2. Mengukur perkiraan kemampuan pemerintah daerah dalam mendapatkan sumber dana dan menetapkan plafon atau batas tertinggi anggaran yang akan dipergunakan untuk mendanai setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan;
3. Menetapkan sasaran dan target kinerja dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik.

C. Dasar Hukum Penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2025

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2025.



BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana penerimaan Kabupaten Boyolali Tahun 2025 berisikan target pendapatan daerah sebesar Rp2.368.916.154.000,00 yang meliputi pendapatan asli daerah sebesar Rp556.989.713.000,00 dan pendapatan transfer Rp1.811.926.441.000,00. Rencana penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp55.000.000.000,00 direncanakan dari Silpa Tahun 2024. Proyeksi rencana penerimaan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Rencana Penerimaan Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2025**

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN	2.368.916.154.000
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	556.989.713.000
4 . 1 . 01	Pajak Daerah	248.363.463.000
4 . 1 . 02	Retribusi Daerah	275.209.969.000
4 . 1 . 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.571.300.000
4 . 1 . 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.844.981.000
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.811.926.441.000
4 . 2 . 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.705.797.441.000
4 . 2 . 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.129.000.000
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.000.000.000
6 . 1 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.000.000.000



BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH TAHUN 2025

Memperhatikan Bab VII RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa program-program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026 merupakan program prioritas dalam pencapaian visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali terpilih Tahun 2021-2026 mengusung visi **"BOYOLALI MAJU, MENERUSKAN PRO INVESTASI" Melangkah dan Menata Bersama, Penuh Totalitas (METAL)**". yang terjemahkan dalam 5 (lima) misi antara lain:

A. Boyolali Melanjutkan Pro Investasi, maju, Sinergi dan Berkelanjutan, dengan tujuan :

Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi, dengan sasaran :

1. Meningkatnya nilai investasi;
2. Meningkatnya peran perusahaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat & pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
3. Meningkatnya pemanfaatan BMD untuk meningkatkan PAD;
4. Meningkatnya perusahaan yang ramah lingkungan;
5. Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata terhadap perekonomian;
6. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian terhadap perekonomian;
7. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan terhadap perekonomian;
8. Meningkatnya kenyamanan transportasi;
9. Meningkatnya stabilitas harga barang dan jasa;

Menurunnya tingkat kemiskinan, dengan sasaran :

1. Menurunnya pengangguran;



2. Meningkatnya perlindungan hak hak tenaga kerja dan promosi lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi seluruh pekerja;
3. Meningkatnya kontribusi dan pertumbuhan sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap perekonomian.

B. Boyolali Sehat, Tangguh, cerdas, berkarakter dan Berbudaya, dengan tujuan :

Meningkatnya SDM yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :

1. Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kontribusi pemuda dalam pembangunan;
4. Meningkatnya nilai budaya lokal sebagai identitas dan katalisator pembangunan; dan
5. Meningkatnya pengendalian penduduk dan keluarga yang berkualitas.

Meningkatnya Keberdayaan Sosial, dengan sasaran :

1. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak;
2. Meningkatnya kesejahteraan PMKS; dan
3. Meningkatnya keberdayaan desa.

Meningkatnya ketahanan sosial, dengan sasaran :

1. Meningkatnya kohesivitas sosial masyarakat; dan
2. Menurunnya resiko bencana.

C. Boyolali Kota Susu, Lumbung Pangan Nasional, yang bertujuan Meningkatkan kesejahteraan petani, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian;
2. Meningkatnya agro industry susu;
3. Meningkatnya kualitas susu; dan
4. Meningkatnya ketahanan pangan.



D. Boyolali menghadirkan Pemerintahan yang bersih, Efektif dan terpercaya, yang bertujuan Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Daerah;
3. Meningkatnya integritas dan kapasitas pemerintah daerah;
4. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan; dan publik
5. Terwujudnya *smart governance* Boyolali.

E. Boyolali tersenyum, Tumbuh, Mandiri dan Berdaya Saing, yang bertujuan Meningkatnya kenyamanan hidup Kabupaten Boyolali dengan sasaran :

1. Meningkatnya Akses Rumah Layak Huni
2. Meningkatnya kualitas prasarana, sarana, dan utilitas permukiman berbasis smartness
3. Meningkatnya kualitas bangunan dan penataan ruang
4. Meningkatnya kualitas air
5. Meningkatnya kualitas udara
6. Meningkatnya kualitas tutupan lahan
7. Meningkatnya penanganan sampah

Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut didukung oleh Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing Perangkat Daerah. Program Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 juga diarahkan untuk senantiasa menjaga sinergitas program Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2025 dengan Prioritas Pembangunan Nasional.

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali merupakan Plafon anggaran bagi Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dimana berdasarkan hasil pembahasan tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali yang pada pelaksanaan urusannya terbagi menjadi Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Tidak Terkait Urusan Pelayanan Dasar.

Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Boyolali Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Plafon Anggaran Sementara Perangkat Daerah

Kabupaten Boyolali Tahun 2025

No	Perangkat Daerah	Pendapatan	Belanja	Pembiayaan
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		688.580.857.000	
2	Dinas Kesehatan	256.337.445.000	513.382.362.000	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.370.000.000	155.562.051.000	
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman		21.290.250.000	
5	Satuan Polisi Pamong Praja		11.332.931.000	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		6.072.391.000	
7	Dinas Sosial		15.402.903.000	
8	Dinas Ketahanan Pangan		4.960.951.000	
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.260.000.000	26.395.480.000	
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		8.160.764.000	
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		15.758.375.000	
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		15.994.960.000	
13	Dinas Perhubungan	1.406.048.000	36.163.051.000	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika		8.244.197.000	
15	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	280.818.000	7.759.503.000	
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		5.516.272.000	
17	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	2.900.000.000	17.994.389.000	
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		5.324.544.000	

19	Dinas Pertanian		25.683.781.000	
20	Dinas Peternakan dan Perikanan	550.000.000	16.989.832.000	
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	8.149.101.000	20.193.492.000	
22	Sekretariat Daerah		31.665.195.000	
23	Sekretariat DPRD		85.125.881.000	
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		6.907.616.000	
25	Badan Keuangan Daerah	2.093.662.742.000	524.022.189.000	29.028.000.000
26	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah		38.628.418.000	
27	Inspektorat Daerah		8.948.013.000	
28	Kecamatan Boyolali		7.964.788.000	
29	Kecamatan Musuk		2.466.330.000	
30	Kecamatan Mojosongo		5.756.238.000	
31	Kecamatan Teras		2.573.002.000	
32	Kecamatan Banyudono		2.694.611.000	
33	Kecamatan Sawit		2.483.066.000	
34	Kecamatan Sambu		2.520.899.000	
35	Kecamatan Ngemplak		2.829.121.000	
36	Kecamatan Simo		2.393.836.000	
37	Kecamatan Nogosari		2.933.490.000	
38	Kecamatan Klego		3.092.229.000	
39	Kecamatan Andong		2.696.377.000	
40	Kecamatan Wonosegoro		2.725.855.000	
41	Kecamatan Karanggede		2.642.175.000	
42	Kecamatan Kemusu		2.824.708.000	
43	Kecamatan Juwangi		3.705.356.000	
44	Kecamatan Ampel		2.363.295.000	
45	Kecamatan Cepogo		3.031.566.000	
46	Kecamatan Selo		2.792.830.000	
47	Kecamatan Gladagsari		2.478.354.000	
48	Kecamatan Tamansari		2.548.967.000	
49	Kecamatan Wonosamodro		2.725.092.000	
50	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik		7.641.321.000	
	JUMLAH	2.368.916.154.000	2.397.944.154.000	29.028.000.000



**Plafon Anggaran Sementara Belanja Operasi, Belanja Modal,
Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer
Kabupaten Boyolali Tahun 2025**

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5	BELANJA	2.397.944.154.000
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.674.327.770.000
5 . 1 . 01	Belanja Pegawai	972.358.297.000
5 . 1 . 02	Belanja Barang dan Jasa	607.005.033.000
5 . 1 . 05	Belanja Hibah	72.688.140.000
5 . 1 . 06	Belanja Bantuan Sosial	22.276.300.000
5 . 2	BELANJA MODAL	238.740.933.000
5 . 2 . 01	Belanja Modal Tanah	5.000.000.000
5 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.471.968.000
5 . 2 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.348.910.000
5 . 2 . 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.472.487.000
5 . 2 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.397.568.000
5 . 2 . 06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	10.000.000.000
5 . 3 . 01	Belanja Tak terduga	10.000.000.000
5 . 4	BELANJA TRANSFER	474.875.451.000
5 . 4 . 01	Belanja Bagi Hasil	25.781.972.000
5 . 4 . 02	Belanja Bantuan Keuangan	449.093.479.000

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Rincian plafon anggaran pembiayaan daerah yang diproyeksikan pada rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

**Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2025**

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.000.000.000
6 . 1 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.000.000.000
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.972.000.000
6 . 2 . 02	Penyertaan Modal Daerah	25.972.000.000
	Bank Jateng	10.972.000.000
	Bank Boyolali	5.000.000.000
	PUDAM Tirta Ampera	8.000.000.000
	Aneka Karya	2.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	29.028.000.000



BAB VI PENUTUP

Demikianlah Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2025. Terhadap hal-hal yang dipandang prinsip, akan dibicarakan lebih lanjut dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2025.

Boyolali, Agustus 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

MARSONO, SH

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT, SH

➤ **Ringkasan**

KUA PPAS

RINGKASAN PRIORITA PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN	2.368.916.154.000
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	556.989.713.000
4 . 1 . 01	Pajak Daerah	248.363.463.000
4 . 1 . 02	Retribusi Daerah	275.209.969.000
4 . 1 . 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.571.300.000
4 . 1 . 04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.844.981.000
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	1.811.926.441.000
4 . 2 . 01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.705.797.441.000
4 . 2 . 02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	106.129.000.000
5	BELANJA	2.397.944.154.000
5 . 1	BELANJA OPERASI	1.674.327.770.000
5 . 1 . 01	Belanja Pegawai	972.358.297.000
5 . 1 . 02	Belanja Barang dan Jasa	607.005.033.000
5 . 1 . 05	Belanja Hibah	72.688.140.000
5 . 1 . 06	Belanja Bantuan Sosial	22.276.300.000
5 . 2	BELANJA MODAL	238.740.933.000
5 . 2 . 01	Belanja Modal Tanah	5.000.000.000
5 . 2 . 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.471.968.000
5 . 2 . 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.348.910.000
5 . 2 . 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.472.487.000
5 . 2 . 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.397.568.000
5 . 2 . 06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	10.000.000.000
5 . 3 . 01	Belanja Tak terduga	10.000.000.000
5 . 4	BELANJA TRANSFER	474.875.451.000
5 . 4 . 01	Belanja Bagi Hasil	25.781.972.000
5 . 4 . 02	Belanja Bantuan Keuangan	449.093.479.000
	SURPLUS / (DEFISIT)	(29.028.000.000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	55.000.000.000
6 . 1 . 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	55.000.000.000
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	25.972.000.000
6 . 2 . 02	Penyertaan Modal Daerah	25.972.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	29.028.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-

➤ **Sinergitas Program
Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten
Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional**

**SINERGITAS PROGRAM PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
TERHADAP PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing				
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.708.093.000,00
			Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.708.093.000,00
2	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar				
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
			Persentase kawasan kumuh yang tertangani		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM)		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	743.000.000,00
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	743.000.000,00
			Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00
			Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh (Program Kemiskinan)		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	200.000.000,00
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
			Persentase kawasan kumuh yang tertangani		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.000.000,00
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM)		

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	Indikator Kinerja	SKPD Pelaksana	Pagu
1	2	3	4	5	6
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00
			Persentase penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana (SPM) dan relokasi		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00
			Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.000.000,00
			Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di kawasan kumuh(Progam Kemiskinan)		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	24.000.000,00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
			Persentase rumah tidak layak huni yang ditingkatkan kualitasnya di luar kawasan kumuh		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14.796.000.000,00
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
			Persentase RLH untuk MBR yang dibangun		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	190.000.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	363.094.000,00
			Persentase penunjang urusan pemerintahan yang terpenuhi sesuai standar		
				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	363.094.000,00

➤ **Plafon Anggaran**
Sementara Berdasarkan
urusan pemerintah dan
Program - Kegiatan

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	683.618.857.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	607.407.357.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	77.427.342.000,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	25.881.839.000,00	
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.500.000.000,00	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	319.500.000,00	
1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	705.525.000,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.170.000.000,00	
1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	100.000.000,00	
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	400.000.000,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	434.800.000,00	
1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	380.000.000,00	
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	458.292.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	13.387.100.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	695.000.000,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	720.000.000,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	300.000.000,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	301.000.000,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.510.622.000,00	
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	500.000.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	25.190.105.000,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	700.000.000,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	598.472.000,00	
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.986.673.000,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	325.930.000,00	
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	610.000.000,00	
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	225.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	7.353.500.000,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	479.530.000,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	475.000.000,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	295.000.000,00	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	1.350.000.000,00	
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	500.000.000,00	
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	291.000.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	22.645.798.000,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	210.798.000,00	
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	125.000.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	16.542.000.000,00	
1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	380.000.000,00	
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	450.000.000,00	
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	4.788.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	150.000.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.709.600.000,00	
1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	1.000.000.000,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.049.600.000,00	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	120.000.000,00	
1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	110.000.000,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	380.000.000,00	
1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	50.000.000,00	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.918.738.000,00	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.918.738.000,00	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.143.200.000,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	775.538.000,00	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	521.061.277.000,00	
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	519.208.480.000,00	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	511.459.480.000,00	
1.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.749.000.000,00	
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	875.797.000,00	
1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	875.797.000,00	
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.500.000,00	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.000.000,00	
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	39.500.000,00	
1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	120.000.000,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000,00	
1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	191.500.000,00	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.000.000,00	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000,00	
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.000.000,00	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.000.000,00	
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0002	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Boyolali	4.015.900.000,00	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	4.015.900.000,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	3.944.500.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3.906.000.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	38.500.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	71.400.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	71.400.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0003	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Musuk	1.660.200.000,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.660.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.623.600.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	36.600.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0004	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Mojosongo	2.750.562.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.725.200.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.362.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0005	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Teras	2.062.280.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.035.800.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	26.480.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0006	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Banyudono	2.103.560.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.076.300.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27.260.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0007	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Sawit	1.145.908.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.123.200.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	22.708.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0008	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Sambu	1.494.640.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.460.700.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	33.940.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0009	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Ngemplak	3.342.700.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	3.314.700.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	28.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0010	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Simo	1.303.400.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.258.200.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	45.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0011	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Nogosari	1.539.700.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.502.100.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.600.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0012	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Klego	1.632.300.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.596.600.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	35.700.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0013	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Andong	2.500.850.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.464.200.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	36.650.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0014	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Wonosegoro	1.875.700.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.829.700.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27.400.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	18.600.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	18.600.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0015	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Karanggede	1.886.500.000,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.886.500.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.856.700.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	29.800.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0016	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Kemusu	1.667.920.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.630.800.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.120.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0017	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Juwangi	2.610.380.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.583.900.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	26.480.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0018	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Ampel	2.019.000.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.988.100.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	30.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0019	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Cepogo	2.880.500.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.843.100.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	37.400.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0020	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Selo	2.140.700.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.113.200.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27.500.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0021	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Gladagsari	2.186.100.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	2.123.100.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	22.800.000,00	
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	40.200.000,00	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	40.200.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0022	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Tamansari	1.526.100.000,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.526.100.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.500.300.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	25.800.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0023	Koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Wonosamodro	1.574.200.000,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1.553.400.000,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	20.800.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0024	UPT SMP N 1 Boyolali	957.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	957.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	957.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0025	UPT SMP N 2 Boyolali	763.400.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	763.400.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0026	UPT SMP N 3 Boyolali	878.900.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	878.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0027	UPT SMP N 4 Boyolali	773.300.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	773.300.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0028	UPT SMP N 5 Boyolali	874.500.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	874.500.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0029	UPT SMP N 6 Boyolali	646.800.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	646.800.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0030	UPT SMP N 1 Musuk	798.600.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	798.600.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0031	UPT SMP N 2 Musuk	408.100.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	408.100.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0032	UPT SMP N 1 Mojosongo	475.200.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	475.200.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0033	UPT SMP N 2 Mojosongo	707.300.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	707.300.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0034	UPT SMP N 3 Mojosongo	759.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	759.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0035	UPT SMP N 4 Mojosongo	217.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	217.800.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0036	UPT SMP N 1 Teras	748.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	748.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0037	UPT SMP N 2 Teras	642.400.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	642.400.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0038	UPT SMP N 3 Teras	443.300.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	443.300.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0039	UPT SMP N 1 Banyudono	808.500.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	808.500.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0040	UPT SMP N 2 Banyudono	845.900.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	845.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0041	UPT SMP N 1 Sawit	838.200.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	838.200.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0042	UPT SMP N 2 Sawit	399.300.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	399.300.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0043	UPT SMP N 3 Sawit	712.800.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	712.800.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0044	UPT SMP N 1 Sambi	757.900.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	757.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0045	UPT SMP N 2 Sambi	107.800.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	107.800.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0046	UPT SMP N 1 Ngemplak	955.900.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	955.900.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0047	UPT SMP N 2 Ngemplak	1.039.500.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.039.500.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0048	UPT SMP N 1 Simo	733.700.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	733.700.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0049	UPT SMP N 2 Simo	462.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	462.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0050	UPT SMP N 3 Simo	289.300.000,00	
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	289.300.000,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	289.300.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0051	UPT SMP N 1 Nogosari	735.900.000,00	
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	735.900.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	735.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0052	UPT SMP N 2 Nogosari	253.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	253.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0053	UPT SMP N 1 Klego	507.100.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	507.100.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0054	UPT SMP N 2 Klego	222.200.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	222.200.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0055	UPT SMP N 1 Andong	779.900.000,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	779.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0056	UPT SMP N 2 Andong	561.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	561.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0057	UPT SMP N 1 Wonosegoro	851.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	851.400.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0058	UPT SMP N 2 Wonosegoro	475.200.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	475.200.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0059	UPT SMP N 1 Karanggede	699.600.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	699.600.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0060	UPT SMP N 2 Karanggede	288.200.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	288.200.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0061	UPT SMP N 1 Kemusu	405.900.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	405.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0062	UPT SMP N 2 Kemusu	371.800.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	371.800.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0063	UPT SMP N 1 Juwangi	636.900.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	636.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0064	UPT SMP N 2 Juwangi	377.300.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	377.300.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0065	UPT SMP N 3 Juwangi Satu Atap	251.900.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	251.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0066	UPT SMP N 1 Ampel	765.600.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	765.600.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0067	UPT SMP N 2 Ampel	776.600.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	776.600.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0068	UPT SMP N 1 Cepogo	748.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	748.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.01.2.22.0.00.01.0069	UPT SMP N 2 Cepogo	345.400.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	345.400.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0070	UPT SMP N 3 Cepogo Satu Atap	248.600.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	248.600.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0071	UPT SMP N 1 Selo	526.900.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	526.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0072	UPT SMP N 2 Selo	177.100.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	177.100.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0073	UPT SMP N 1 Gladagsari	572.000.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	572.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0074	UPT SMP N 2 Gladagsari Satu Atap	218.900.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	218.900.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0075	UPT SMP N 1 Tamansari Satu Atap	327.800.000,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	327.800.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0077	UPT SKB Boyolali	123.800.000,00	
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	123.800.000,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	73.800.000,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.000.000,00	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	512.355.004.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	229.311.397.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	109.913.055.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	39.437.711.000,00	
1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas	21.525.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	686.212.000,00	
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	144.283.000,00	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	16.962.147.000,00	
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	120.069.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	69.810.459.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	18.400.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.500.000,00	
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	159.645.000,00	
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	109.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	37.483.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	18.890.000,00	
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	341.088.000,00	
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	20.238.000,00	
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	690.725.000,00	
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	18.850.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	836.637.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	734.190.000,00	
1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	14.188.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	296.250.000,00	
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	38.000.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.960.904.000,00	
1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	397.982.000,00	
1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	16.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	60.060.000,00	
1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	33.814.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.825.183.000,00	
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	59.999.571.000,00	
1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	148.301.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	15.000.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.200.000,00	
1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	53.595.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.760.000,00	
1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	285.400.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	360.750.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	44.000.000,00	
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	105.280.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	153.775.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	230.565.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	230.565.000,00	
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	434.320.000,00	
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	434.320.000,00	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.612.975.000,00	
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	199.467.000,00	
1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	199.467.000,00	
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.413.508.000,00	
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.413.508.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	496.632.000,00	
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100.713.000,00	
1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100.713.000,00	
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	168.228.000,00	
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	168.228.000,00	
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	227.691.000,00	
1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	227.691.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	62.045.000,00	
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.808.000,00	
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	16.808.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	45.237.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	45.237.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	117.226.690.000,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	110.784.517.000,00	
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	108.751.717.000,00	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.032.800.000,00	
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.392.883.000,00	
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.293.000,00	
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	483.201.000,00	
1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	130.420.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	387.678.000,00	
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	320.182.000,00	
1.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	352.164.000,00	
1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	440.240.000,00	
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.705.000,00	
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.572.410.000,00	
1.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	132.260.000,00	
1.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.440.150.000,00	
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.359.656.000,00	
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	53.200.000,00	
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.306.456.000,00	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.117.224.000,00	
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.797.000,00	
1.02.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	50.000.000,00	
1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	348.432.000,00	
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	588.995.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0002	UPT Puskesmas Boyolali 1	2.165.590.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	643.332.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	642.132.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	72.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	14.250.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	15.900.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	109.685.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.320.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	164.720.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	123.957.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16.100.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.100.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.100.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.400.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	6.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	52.000.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.200.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.200.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	73.190.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73.190.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	73.190.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.449.068.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.449.068.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.449.068.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0003	UPT Puskesmas Boyolali 2	754.332.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	641.482.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	640.282.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.500.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	58.250.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	12.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.300.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	169.680.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.500.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.990.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	67.696.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	162.266.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.500.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	20.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	5.500.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	73.900.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.200.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.200.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	112.850.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	112.850.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	112.850.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0004	UPT Puskesmas Musuk	2.144.093.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	783.661.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	783.661.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	58.500.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	25.940.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.150.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	14.250.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	188.069.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	19.800.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	26.374.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	159.300.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	184.928.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	150.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	27.300.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	57.600.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	20.360.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.360.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	20.360.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.340.072.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.340.072.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.340.072.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0005	UPT Puskesmas Mojosongo	2.929.829.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	881.531.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	875.531.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	76.700.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	39.390.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.500.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13.500.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	157.644.500,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.200.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	36.590.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	165.300.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	219.176.500,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14.630.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.300.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	37.400.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	76.500.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	6.000.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	6.000.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	37.575.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.575.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	37.575.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.010.723.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.010.723.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.010.723.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0006	UPT Puskesmas Teras	2.315.164.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	676.500.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	675.093.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	70.650.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.070.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.150.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.200.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	174.851.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.050.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	16.110.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	90.230.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	175.502.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	7.055.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	6.900.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	750.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.100.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	87.075.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.407.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.407.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	58.650.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.650.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	58.650.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.580.014.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.580.014.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.580.014.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0007	UPT Puskesmas Banyudono 1	1.778.264.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	668.590.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	656.879.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.920.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	60.075.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.100.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.200.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	600.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	175.596.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.100.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.755.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79.526.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	130.872.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.860.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	600.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	700.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	31.005.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	74.370.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	11.711.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	11.711.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	60.475.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.475.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	60.475.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.049.199.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.049.199.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.049.199.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0008	UPT Puskesmas Banyudono 2	1.256.925.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	650.865.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	650.865.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.400.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	26.400.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	200.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	172.640.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.400.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	46.905.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	120.505.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	179.515.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.100.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	400.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	25.800.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	27.200.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	31.000.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	31.000.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	31.000.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	575.060.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	575.060.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	575.060.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0009	UPT Puskesmas Sawit	2.126.358.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	633.225.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	633.225.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	59.100.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.200.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.200.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8.400.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	200.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	182.184.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.400.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	19.789.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	71.436.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	166.956.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.500.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	300.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	17.460.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	72.800.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	51.605.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.605.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	51.605.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.441.528.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.441.528.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.441.528.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0010	UPT Puskesmas Sambi	2.824.366.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	769.983.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	768.383.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.500.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.500.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	450.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	156.143.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.250.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.050.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	111.960.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	160.980.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.900.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	450.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	51.600.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	109.600.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.600.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.600.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	14.750.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.750.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	14.750.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.039.633.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.039.633.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.039.633.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0011	UPT Puskesmas Ngemplak	3.578.333.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	828.053.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	828.053.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	19.100.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.300.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	252.402.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.300.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.280.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	191.417.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	180.414.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16.940.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	500.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	43.600.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	33.540.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.540.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	33.540.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.716.740.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.716.740.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.716.740.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0012	UPT Puskesmas Simo	2.627.831.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	638.685.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	637.085.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	21.800.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.800.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17.000.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.900.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	150.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	157.934.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.550.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	89.799.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	172.002.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.600.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	300.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.100.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	9.450.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	101.100.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.600.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.600.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.700.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	23.700.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	23.700.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.965.446.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.965.446.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.965.446.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0013	UPT Puskesmas Nogosari	3.956.906.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	942.053.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	940.098.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	78.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.200.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	19.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.625.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.100.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	206.064.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.150.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	35.850.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	183.882.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	220.687.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	14.240.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	5.250.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	300.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	33.550.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	96.600.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.955.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.955.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50.950.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.950.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50.950.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.963.903.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.963.903.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.963.903.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0014	UPT Puskesmas Klego 1	2.040.229.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	552.035.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	550.235.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.600.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.150.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.100.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.050.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170.050.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.800.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	10.320.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	95.528.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	125.272.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.800.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.250.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	8.100.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.350.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	14.865.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	49.400.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.800.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.800.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.400.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.400.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.400.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.466.794.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.466.794.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.466.794.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0015	UPT Puskesmas Klego 2	1.979.733.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	741.396.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	739.516.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.600.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	37.300.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	4.750.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	245.792.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4.500.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18.275.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	96.980.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	170.979.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.840.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	1.200.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	900.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	26.600.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	69.800.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.880.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.880.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	50.475.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.475.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	50.475.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.187.862.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.187.862.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.187.862.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0016	UPT Puskesmas Andong	4.189.543.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.002.746.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.000.785.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	79.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	12.100.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	21.500.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	11.600.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.875.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.022.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	344.036.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.950.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	26.766.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	161.660.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	223.106.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	10.070.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.900.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.000.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	84.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.961.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.961.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	49.650.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.650.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	49.650.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.137.147.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.137.147.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.137.147.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0017	UPT Puskesmas Wonosegoro	3.639.829.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	702.629.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	700.829.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	9.535.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.700.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	22.400.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	9.150.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	167.981.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	27.000.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12.550.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.630.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	158.433.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	450.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	93.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.800.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.800.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	61.220.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.220.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	61.220.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.875.980.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.875.980.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.875.980.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0018	UPT Puskesmas Karanggede	3.879.191.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.063.519.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.061.651.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	73.000.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	29.000.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.600.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.050.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	400.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	245.008.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	11.400.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	28.300.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	243.050.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	263.363.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	12.105.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.500.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	2.250.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	24.200.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	111.425.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.868.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.868.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	32.225.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.225.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	32.225.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.783.447.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.783.447.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.783.447.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0019	UPT Puskesmas Kemusu	2.927.441.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	742.957.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	741.157.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.500.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.610.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.700.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	12.720.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	11.250.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	2.700.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	176.870.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	37.952.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	194.135.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	164.500.000,00	
1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5.620.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	52.700.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.800.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.800.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	37.360.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.360.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	37.360.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.147.124.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.147.124.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.147.124.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0020	UPT Puskesmas Juwangi	2.892.258.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	915.237.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	913.288.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	50.500.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	43.700.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	16.800.000,00	
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	25.175.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.075.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	300.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	244.343.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	7.600.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	29.600.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	219.830.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	184.715.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.050.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	83.600.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.949.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.949.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	61.425.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	61.425.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	61.425.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.915.596.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.915.596.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.915.596.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0021	UPT Puskesmas Ampel	2.877.267.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	632.158.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	631.448.400,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.400.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	34.800.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	8.900.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	7.450.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	173.837.200,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	14.400.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	17.825.200,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	104.640.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	170.611.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	16.385.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	46.700.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	709.600,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	709.600,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	78.200.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	78.200.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	78.200.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.166.909.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.166.909.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.166.909.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0022	UPT Puskesmas Cepogo	3.855.856.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	665.977.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	664.777.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.725.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.450.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.100.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.500.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	525.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	162.018.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.800.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	31.705.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	99.660.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	167.869.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.250.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	9.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	400.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	3.650.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	90.125.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.200.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.200.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	13.475.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	13.475.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	13.475.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.176.404.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	3.176.404.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	3.176.404.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0023	UPT Puskesmas Selo	2.409.862.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	695.943.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	692.431.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	47.850.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	10.675.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	11.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.400.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	4.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	241.779.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.675.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1.800.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	98.981.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	164.246.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.125.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	2.750.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	3.800.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	41.350.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	40.200.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	3.512.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3.512.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	58.900.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	58.900.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	58.900.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.655.019.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.655.019.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.655.019.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0024	UPT Puskesmas Gladagsari	2.605.174.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	803.705.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	802.473.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.400.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.050.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.550.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	18.000.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	215.502.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.750.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	25.200.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	122.387.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	184.634.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	36.000.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	49.600.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	83.400.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.232.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.232.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	21.100.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.100.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	21.100.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.780.369.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.780.369.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.780.369.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0025	UPT Puskesmas Tamansari	2.064.228.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	707.678.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	704.478.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	45.500.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	42.875.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.500.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	6.300.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	1.500.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	182.564.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	13.200.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30.762.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	93.600.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	184.227.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	4.500.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	4.500.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	600.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	20.950.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	66.900.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	3.200.000,00	
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3.200.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	51.600.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	51.600.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.304.950.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.304.950.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.304.950.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0026	UPT Puskesmas Wonosamodro	3.026.613.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	761.683.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	759.763.000,00	
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	69.600.000,00	
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	50.650.000,00	
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	10.800.000,00	
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.800.000,00	
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	300.000,00	
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	191.141.000,00	
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.950.000,00	
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	23.942.000,00	
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	129.280.000,00	
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	172.125.000,00	
1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	3.000.000,00	
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	3.600.000,00	
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	6.300.000,00	
1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	22.075.000,00	
1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	55.200.000,00	
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1.920.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1.920.000,00	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	53.300.000,00	
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.300.000,00	
1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	53.300.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.211.630.000,00	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	2.211.630.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.211.630.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0027	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	868.470.000,00	
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	868.470.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0127	Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang	148.066.732.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	148.066.732.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3.066.732.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.066.732.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	145.000.000.000,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	145.000.000.000,00	
1.02.0.00.0.00.01.0129	Rumah Sakit Umum Daerah Waras- Wiris	34.076.600.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.039.000.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.039.000.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.010.000.000,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	32.010.000.000,00	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.600.000,00	
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.600.000,00	
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.02.0.00.0.00.01.0131	Rumah Sakit Umum Daerah Simo	33.186.590.000,00	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	33.186.590.000,00	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.686.590.000,00	
1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.686.590.000,00	
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.500.000.000,00	
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	30.500.000.000,00	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	155.012.063.000,00	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	155.012.063.000,00	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.450.000.000,00	
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.550.000.000,00	
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
1.03.02.2.01.0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	200.000.000,00	
1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	200.000.000,00	
1.03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	950.000.000,00	
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	4.000.000.000,00	
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.900.000.000,00	
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	5.000.000.000,00	
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.300.000.000,00	
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	900.000.000,00	
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.700.000.000,00	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	9.050.000.000,00	
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	9.050.000.000,00	
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.03.2.01.0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	200.000.000,00	
1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	7.000.000.000,00	
1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	250.000.000,00	
1.03.03.2.01.0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.03.03.2.01.0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	500.000.000,00	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	3.100.000.000,00	
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.100.000.000,00	
1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	1.200.000.000,00	
1.03.05.2.01.0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	1.800.000.000,00	
1.03.05.2.01.0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	100.000.000,00	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.550.000.000,00	
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.550.000.000,00	
1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	50.000.000,00	
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.500.000.000,00	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	14.200.000.000,00	
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	14.200.000.000,00	
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	12.500.000.000,00	
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	200.000.000,00	
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1.200.000.000,00	
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	1.200.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	1.200.000.000,00	
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	93.279.137.000,00	
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	93.279.137.000,00	
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan	5.750.000.000,00	
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	17.696.500.000,00	
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	37.139.073.000,00	
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar	4.750.000.000,00	
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	11.534.000.000,00	
1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan	2.384.500.000,00	
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	300.000.000,00	
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	6.725.064.000,00	
1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan	7.000.000.000,00	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	679.069.000,00	
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000,00	
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	100.000.000,00	
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	579.069.000,00	
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	579.069.000,00	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.863.500.000,00	
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.315.000.000,00	
1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	50.000.000,00	
1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	1.265.000.000,00	
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	248.500.000,00	
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	248.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	225.000.000,00	
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	75.000.000,00	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.090.345.000,00	
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.645.367.000,00	
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.945.392.000,00	
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	699.975.000,00	
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.279.978.000,00	
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.990.000,00	
1.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	80.000.000,00	
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	85.000.000,00	
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000,00	
1.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	125.000.000,00	
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.000.000,00	
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.000.000,00	
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	25.000.000,00	
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	470.000.000,00	
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000,00	
1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	300.000.000,00	
1.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	365.000.000,00	
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.000.000,00	
1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.000.000,00	
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330.000.000,00	
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	175.000.000,00	
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.000.000,00	
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	21.290.250.000,00	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.290.250.000,00	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.183.485.000,00	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	883.000.000,00	
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	120.000.000,00	
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	120.000.000,00	
1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
1.04.02.2.03.0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	543.000.000,00	
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	200.485.000,00	
1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	200.485.000,00	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	14.988.000.000,00	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	
1.04.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	50.000.000,00	
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	36.000.000,00	
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	36.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	14.902.000.000,00	
1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	14.478.000.000,00	
1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	424.000.000,00	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.686.000.000,00	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.686.000.000,00	
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	618.000.000,00	
1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	1.068.000.000,00	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	190.000.000,00	
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	190.000.000,00	
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	40.000.000,00	
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	150.000.000,00	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.242.765.000,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.536.550.000,00	
1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.347.550.000,00	
1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.000.000,00	
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.000.000,00	
1.04.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000,00	
1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000,00	
1.04.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.534.000,00	
1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.988.000,00	
1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.04.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	30.000.000,00	
1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000,00	
1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.478.000,00	
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.015.000,00	
1.04.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000,00	
1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.150.000,00	
1.04.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.165.000,00	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	232.200.000,00	
1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122.150.000,00	
1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.050.000,00	
1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	17.405.322.000,00	
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	11.332.931.000,00	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.496.300.000,00	
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	981.300.000,00	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	56.800.000,00	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	284.450.000,00	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	200.050.000,00	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	140.000.000,00	
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	300.000.000,00	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	515.000.000,00	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	515.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.554.800.000,00	
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	888.310.875,00	
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	66.900.000,00	
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	771.410.875,00	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	300.000.000,00	
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	300.000.000,00	
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	30.000.000,00	
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	30.000.000,00	
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	336.489.125,00	
1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	30.000.000,00	
1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	306.489.125,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.281.831.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.919.178.000,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.976.178.000,00	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.943.000.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	701.589.400,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.999.400,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.000.000,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.095.000,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	277.483.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.016.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	199.996.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.148.600,00	
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64.500.000,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.048.600,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	591.915.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	316.915.000,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	225.000.000,00	
1.05.0.00.0.00.04.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.072.391.000,00	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.239.001.000,00	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	126.612.000,00	
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	126.612.000,00	
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	376.329.000,00	
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	5.700.000,00	
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	92.617.000,00	
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	108.512.000,00	
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	8.600.000,00	
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	150.000.000,00	
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	10.900.000,00	
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	245.300.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	245.300.000,00	
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	490.760.000,00	
1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	1.000.000,00	
1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	61.800.000,00	
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	15.900.000,00	
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	312.060.000,00	
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	100.000.000,00	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.833.390.000,00	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.744.536.000,00	
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.042.536.000,00	
1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	702.000.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	568.473.000,00	
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.971.000,00	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.608.000,00	
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	206.406.000,00	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.039.000,00	
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	69.401.000,00	
1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.720.000,00	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.328.000,00	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.200.000,00	
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	35.200.000,00	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.950.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.400.000,00	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	550.000,00	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.231.000,00	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	237.900.000,00	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	95.000.000,00	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	44.331.000,00	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	15.402.903.000,00	
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	15.402.903.000,00	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	321.900.000,00	
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	321.900.000,00	
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6.500.000,00	
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	4.800.000,00	
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000.000,00	
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	304.600.000,00	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2.181.230.000,00	
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.331.250.000,00	
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	750.250.000,00	
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	86.750.000,00	
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	100.000.000,00	
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	364.250.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	30.000.000,00	
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	849.980.000,00	
1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	600.000.000,00	
1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan	199.980.000,00	
1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang	40.000.000,00	
1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu	10.000.000,00	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.436.050.000,00	
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.436.050.000,00	
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	202.650.000,00	
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.393.600.000,00	
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.839.800.000,00	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	735.000.000,00	
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	410.000.000,00	
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	250.000.000,00	
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	75.000.000,00	
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	75.000.000,00	
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000,00	
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	325.000.000,00	
1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	50.000.000,00	
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	275.000.000,00	
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	228.050.000,00	
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	228.050.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	228.050.000,00	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.500.673.000,00	
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.033.357.000,00	
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.045.373.000,00	
1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	987.984.000,00	
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	878.723.000,00	
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.069.000,00	
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	224.600.000,00	
1.06.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.500.000,00	
1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.980.000,00	
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.950.000,00	
1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	49.359.000,00	
1.06.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	237.265.000,00	
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120.000.000,00	
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	46.600.000,00	
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	46.600.000,00	
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.788.000,00	
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.100.000,00	
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.488.000,00	
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.200.000,00	
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	430.205.000,00	
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.205.000,00	
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	275.000.000,00	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	1.318.538.000,00	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	1.318.538.000,00	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	255.625.000,00	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	180.625.000,00	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	180.625.000,00	
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	75.000.000,00	
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	75.000.000,00	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	945.513.000,00	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	945.513.000,00	
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	741.389.000,00	
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	9.000.000,00	
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	13.400.000,00	
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	181.724.000,00	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	117.400.000,00	
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	117.400.000,00	
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	117.400.000,00	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	102.235.000,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	102.235.000,00	
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	19.335.000,00	
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	2.000.000,00	
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	17.335.000,00	
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	17.335.000,00	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	14.700.000,00	
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	700.000,00	
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	700.000,00	
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	14.000.000,00	
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	14.000.000,00	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	60.500.000,00	
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	42.000.000,00	
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	42.000.000,00	
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	18.500.000,00	
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	18.500.000,00	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	7.700.000,00	
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	7.700.000,00	
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	7.700.000,00	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	4.960.951.000,00	
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	4.960.951.000,00	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.442.626.000,00	
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	405.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	405.000.000,00	
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	159.980.000,00	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	159.980.000,00	
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	877.646.000,00	
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	877.646.000,00	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	165.000.000,00	
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	15.000.000,00	
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	15.000.000,00	
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.000,00	
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	90.426.000,00	
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	90.426.000,00	
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	90.426.000,00	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.262.899.000,00	
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.683.969.000,00	
2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.548.969.000,00	
2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.000.000,00	
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	437.321.000,00	
2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.000,00	
2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.300.000,00	
2.09.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.000.000,00	
2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.001.000,00	
2.09.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	31.521.000,00	
2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.500.000,00	
2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.000.000,00	
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.000.000,00	
2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	
2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	55.000.000,00	
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.609.000,00	
2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	45.000.000,00	
2.09.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	38.609.000,00	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	100.000.000,00	
1.03.2.10.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100.000.000,00	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	100.000.000,00	
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000,00	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	26.395.480.000,00	
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	26.395.480.000,00	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	230.000.000,00	
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	180.000.000,00	
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	180.000.000,00	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.790.792.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	875.992.000,00	
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	346.000.000,00	
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	199.992.000,00	
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	330.000.000,00	
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	914.800.000,00	
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	70.800.000,00	
2.11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	844.000.000,00	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	6.072.885.000,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	6.072.885.000,00	
2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya	801.816.000,00	
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.405.000.000,00	
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	486.069.000,00	
2.11.04.2.01.0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	1.380.000.000,00	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	73.500.000,00	
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	73.500.000,00	
2.11.05.2.01.0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	24.000.000,00	
2.11.05.2.01.0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	49.500.000,00	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	158.400.000,00	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	158.400.000,00	
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	56.500.000,00	
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	101.900.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.300.000,00	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.300.000,00	
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	10.300.000,00	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.910.465.000,00	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1.910.465.000,00	
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	296.600.000,00	
2.11.11.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	299.000.000,00	
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	330.000.000,00	
2.11.11.2.01.0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	215.000.000,00	
2.11.11.2.01.0010	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	100.000.000,00	
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	669.865.000,00	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.149.138.000,00	
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.008.165.000,00	
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.061.599.000,00	
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.946.566.000,00	
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.263.138.000,00	
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.278.000,00	
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.525.000,00	
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000,00	
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	926.800.000,00	
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000,00	
2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	126.535.000,00	
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	338.335.000,00	
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.750.000,00	
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328.840.000,00	
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.745.000,00	
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	539.500.000,00	
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.500.000,00	
2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	160.000.000,00	
2.11.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	50.000.000,00	
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.160.764.000,00	
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.160.764.000,00	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	50.000.000,00	
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	50.000.000,00	
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	50.000.000,00	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	40.000.000,00	
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	40.000.000,00	
2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	40.000.000,00	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	378.200.000,00	
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	338.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	338.200.000,00	
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	40.000.000,00	
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	40.000.000,00	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.692.564.000,00	
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.714.740.000,00	
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.499.140.000,00	
2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.215.600.000,00	
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.221.610.000,00	
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.484.000,00	
2.12.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.000.000,00	
2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000,00	
2.12.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	710.000.000,00	
2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	163.126.000,00	
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000,00	
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.250.000,00	
2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	99.250.000,00	
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.510.000,00	
2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.310.000,00	
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	477.200.000,00	
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.454.000,00	
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	48.615.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.839.000,00	
2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15.758.375.000,00	
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.758.375.000,00	
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	25.000.000,00	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	25.000.000,00	
2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	25.000.000,00	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	9.078.718.000,00	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	9.078.718.000,00	
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	6.884.718.000,00	
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	2.014.000.000,00	
2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	20.000.000,00	
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	160.000.000,00	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	233.700.000,00	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	233.700.000,00	
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	80.000.000,00	
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	58.000.000,00	
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	95.700.000,00	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.420.957.000,00	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.294.857.000,00	
2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.330.657.000,00	
2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	964.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	810.750.000,00	
2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.000.000,00	
2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	34.422.000,00	
2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.750.000,00	
2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.578.000,00	
2.13.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	65.000.000,00	
2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00	
2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.000.000,00	
2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85.350.000,00	
2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.750.000,00	
2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	81.600.000,00	
2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.000.000,00	
2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00	
2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	55.000.000,00	
2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15.892.725.000,00	
2.08.2.14.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.892.725.000,00	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	521.840.000,00	
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	521.840.000,00	
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	521.840.000,00	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.859.174.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.841.340.000,00	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	1.283.690.000,00	
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	331.650.000,00	
2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	226.000.000,00	
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	634.800.000,00	
2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	634.800.000,00	
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.605.224.000,00	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	90.000.000,00	
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2.515.224.000,00	
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	777.810.000,00	
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	777.810.000,00	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	5.992.600.000,00	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	5.992.600.000,00	
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000,00	
2.14.04.2.01.0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	5.692.600.000,00	
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.519.111.000,00	
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.014.006.000,00	
2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.816.006.000,00	
2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	198.000.000,00	
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	342.032.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	
2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.996.000,00	
2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.998.000,00	
2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.034.500,00	
2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	163.984.000,00	
2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75.019.500,00	
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.300.000,00	
2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.300.000,00	
2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.000.000,00	
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.773.000,00	
2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.997.000,00	
2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	
2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	34.776.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	36.163.051.000,00	
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	36.163.051.000,00	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	8.383.000.000,00	
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.625.000.000,00	
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.500.000.000,00	
2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	25.000.000,00	
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1.100.000.000,00	
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	40.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	40.000.000,00	
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	50.000.000,00	
2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	993.000.000,00	
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	900.000.000,00	
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	93.000.000,00	
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	425.000.000,00	
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
2.15.02.2.06.0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	395.000.000,00	
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	250.000.000,00	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.780.051.000,00	
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.279.672.000,00	
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.407.096.000,00	
2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.872.576.000,00	
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	578.629.000,00	
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.629.000,00	
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	
2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	299.998.000,00	
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.002.000,00	
2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	125.000.000,00	
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	81.000.000,00	
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.751.750.000,00	
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.750.000.000,00	
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	750.000,00	
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000,00	
2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	125.000.000,00	
2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.143.297.000,00	
2.16.2.21.0.00.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.143.297.000,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	802.300.000,00	
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	802.300.000,00	
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	655.500.000,00	
2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	146.800.000,00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.270.000.000,00	
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	990.000.000,00	
2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	990.000.000,00	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000,00	
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	280.000.000,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.171.897.000,00	
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.380.590.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.420.590.000,00	
2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	960.000.000,00	
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	321.400.000,00	
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.200.000,00	
2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.800.000,00	
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
2.16.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	
2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	80.400.000,00	
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	342.900.000,00	
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	340.000.000,00	
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.007.000,00	
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.000.000,00	
2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.007.000,00	
2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	6.440.965.000,00	
2.17.2.07.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja	6.440.965.000,00	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	27.670.000,00	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	27.670.000,00	
2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	27.670.000,00	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	70.000.000,00	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	70.000.000,00	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.343.295.000,00	
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.229.782.000,00	
2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.824.782.000,00	
2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	405.000.000,00	
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	840.705.000,00	
2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.152.000,00	
2.17.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.780.000,00	
2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	
2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	97.840.000,00	
2.17.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	115.163.000,00	
2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	246.300.000,00	
2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	283.470.000,00	
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.808.000,00	
2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.850.000,00	
2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000,00	
2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	958.000,00	
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.000.000,00	
2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	60.000.000,00	
2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.516.272.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.516.272.000,00	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	35.000.000,00	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	35.000.000,00	
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	35.000.000,00	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	55.800.000,00	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.800.000,00	
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	5.800.000,00	
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1.800.000,00	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	1.800.000,00	
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1.800.000,00	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	583.883.000,00	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	583.883.000,00	
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	74.175.000,00	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	482.083.000,00	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	27.625.000,00	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.000.000,00	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.000.000,00	
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	35.000.000,00	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.804.789.000,00	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.517.644.000,00	
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.193.644.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	324.000.000,00	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	388.000.000,00	
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	
2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.000.000,00	
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	60.000.000,00	
2.18.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	45.000.000,00	
2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000,00	
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	530.000.000,00	
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	190.000.000,00	
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	273.145.000,00	
2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.300.000,00	
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	133.800.000,00	
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.045.000,00	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.000.000,00	
2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	46.000.000,00	
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	
2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	6.343.398.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	6.343.398.000,00	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	172.485.000,00	
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	73.300.000,00	
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	73.300.000,00	
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.185.000,00	
2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	99.185.000,00	
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.870.913.000,00	
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.410.000.000,00	
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	1.410.000.000,00	
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.011.630.000,00	
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	590.000.000,00	
2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	421.630.000,00	
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	249.283.000,00	
2.19.03.2.03.0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	93.033.000,00	
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	156.250.000,00	
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3.200.000.000,00	
2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	3.200.000.000,00	
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000,00	
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000,00	
2.19.04.2.01.0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	300.000.000,00	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	4.962.000.000,00	
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.962.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	3.114.000.000,00	
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.114.000.000,00	
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	92.000.000,00	
2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	238.000.000,00	
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.784.000.000,00	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	998.000.000,00	
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	998.000.000,00	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	902.000.000,00	
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya	96.000.000,00	
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	850.000.000,00	
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	850.000.000,00	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	850.000.000,00	
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.107.984.000,00	
2.23.2.24.0.00.02.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.107.984.000,00	
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	596.200.000,00	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	331.700.000,00	
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	4.700.000,00	
2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000,00	
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	2.000.000,00	
2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	2.000.000,00	
2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	1.000.000,00	
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	100.000.000,00	
2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	200.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	20.000.000,00	
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	264.500.000,00	
2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	62.000.000,00	
2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	112.500.000,00	
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	90.000.000,00	
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.511.784.000,00	
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.806.610.000,00	
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.401.010.000,00	
2.23.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	405.600.000,00	
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	366.641.000,00	
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.937.000,00	
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.000.000,00	
2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.000.000,00	
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.200.000,00	
2.23.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000,00	
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.504.000,00	
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.233.000,00	
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	188.830.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.403.000,00	
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	146.300.000,00	
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.300.000,00	
2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	20.000.000,00	
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.000.000,00	
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	216.560.000,00	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	112.300.000,00	
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	12.700.000,00	
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	1.800.000,00	
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	1.800.000,00	
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	9.100.000,00	
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	38.600.000,00	
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	25.000.000,00	
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	13.600.000,00	
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	61.000.000,00	
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	1.000.000,00	
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000,00	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	104.260.000,00	
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.800.000,00	
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	2.800.000,00	
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	52.800.000,00	
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	2.800.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	50.000.000,00	
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	28.860.000,00	
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	28.860.000,00	
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	17.000.000,00	
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	2.000.000,00	
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	15.000.000,00	
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	2.800.000,00	
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	2.800.000,00	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.668.538.000,00	
3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Peternakan dan Perikanan	4.668.538.000,00	
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	347.600.000,00	
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	347.600.000,00	
3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	347.600.000,00	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.010.938.000,00	
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	4.010.938.000,00	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00	
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.920.938.000,00	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	310.000.000,00	
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	310.000.000,00	
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	310.000.000,00	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	11.650.991.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
2.19.3.26.0.00.01.0000	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	11.650.991.000,00	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.642.180.000,00	
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.461.980.000,00	
3.26.02.2.01.0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1.461.980.000,00	
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	977.000.000,00	
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	120.000.000,00	
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	657.000.000,00	
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	203.200.000,00	
3.26.02.2.04.0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	203.200.000,00	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	568.225.000,00	
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	568.225.000,00	
3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	193.000.000,00	
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	375.225.000,00	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	277.175.000,00	
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	277.175.000,00	
3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	143.800.000,00	
3.26.05.2.01.0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	133.375.000,00	
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.163.411.000,00	
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.572.859.000,00	
3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.275.859.000,00	
3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	297.000.000,00	
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.779.232.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.26.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.000.000,00	
3.26.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.923.000,00	
3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.700.000,00	
3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	269.914.000,00	
3.26.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	122.366.500,00	
3.26.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	484.935.000,00	
3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	566.393.500,00	
3.26.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100.000.000,00	
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000,00	
3.26.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	70.000.000,00	
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514.600.000,00	
3.26.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,00	
3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	446.000.000,00	
3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.600.000,00	
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	226.720.000,00	
3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	76.720.000,00	
3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000,00	
3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	38.005.075.000,00	
3.25.3.27.0.00.01.0000	Dinas Peternakan dan Perikanan	12.321.294.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.050.000.000,00	
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1.100.000.000,00	
3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	25.000.000,00	
3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	25.000.000,00	
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	925.000.000,00	
3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	50.000.000,00	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	875.000.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	148.241.000,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	148.241.000,00	
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	148.241.000,00	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.647.721.000,00	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	1.342.875.000,00	
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	130.000.000,00	
3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	125.000.000,00	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.087.875.000,00	
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	89.846.000,00	
3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	89.846.000,00	
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	215.000.000,00	
3.27.04.2.04.0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	140.000.000,00	
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	75.000.000,00	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	86.500.000,00	
3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	86.500.000,00	
3.27.06.2.02.0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	86.500.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.388.832.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.443.918.000,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.783.918.000,00	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	660.000.000,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.000.800,00	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.000.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	40.000.800,00	
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	65.000.000,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.913.200,00	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	200.000.000,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	913.200,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	222.000.000,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.000.000,00	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.000.000,00	
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000,00	
3.27.5.05.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	25.683.781.000,00	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	7.446.314.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	7.446.314.000,00	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.650.000.000,00	
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5.796.314.000,00	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.112.000.000,00	
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	2.112.000.000,00	
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	656.700.000,00	
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	300.000.000,00	
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	120.000.000,00	
3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	100.000.000,00	
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	420.000.000,00	
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	515.300.000,00	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	399.000.000,00	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	399.000.000,00	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	105.000.000,00	
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	294.000.000,00	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	307.500.000,00	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	307.500.000,00	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	307.500.000,00	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.418.967.000,00	
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.440.008.000,00	
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.169.408.000,00	
3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	270.600.000,00	
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	516.159.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.167.000,00	
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.000.000,00	
3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000,00	
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	95.000.000,00	
3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	110.000.000,00	
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.992.000,00	
3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	15.000.000,00	
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	262.800.000,00	
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	261.800.000,00	
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000,00	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000,00	
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	18.220.732.000,00	
3.30.3.31.0.00.02.0000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	18.220.732.000,00	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.000.000.000,00	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.000.000.000,00	
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.000.000.000,00	
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	144.240.000,00	
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	144.240.000,00	
3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	144.240.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	20.000.000,00	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	20.000.000,00	
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	20.000.000,00	
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	136.313.000,00	
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	136.313.000,00	
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	136.313.000,00	
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.920.179.000,00	
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.617.509.000,00	
3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.133.509.000,00	
3.30.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.484.000.000,00	
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	714.000.000,00	
3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000,00	
3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.000.000,00	
3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	175.000.000,00	
3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	118.000.000,00	
3.30.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	125.000.000,00	
3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000,00	
3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000,00	
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	353.240.000,00	
3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.670.000,00	
3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.500.000,00	
3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.070.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235.430.000,00	
3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	220.430.000,00	
3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000,00	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.972.760.000,00	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.972.760.000,00	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.972.760.000,00	
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.972.760.000,00	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	31.665.195.000,00	
4.01.5.06.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali	31.665.195.000,00	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.058.304.000,00	
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	50.000.000,00	
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	50.000.000,00	
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	7.837.402.000,00	
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	6.268.920.000,00	
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.568.482.000,00	
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	170.902.000,00	
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	18.810.000,00	
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	96.092.000,00	
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	56.000.000,00	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	654.615.000,00	
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	50.000.000,00	
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	447.365.000,00	
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	372.365.000,00	
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	75.000.000,00	
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	157.250.000,00	
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	157.250.000,00	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.952.276.000,00	
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.814.096.000,00	
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.428.976.000,00	
4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.385.120.000,00	
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.626.707.000,00	
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.950.000,00	
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	316.262.000,00	
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	450.000.000,00	
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	206.400.000,00	
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000,00	
4.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	100.000.000,00	
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	829.760.000,00	
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	504.335.000,00	
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000,00	
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	30.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	759.600.000,00	
4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	726.000.000,00	
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000,00	
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.100.000,00	
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	909.325.000,00	
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00	
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000,00	
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	30.000.000,00	
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	73.950.000,00	
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	355.375.000,00	
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	985.973.000,00	
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	251.449.000,00	
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	89.250.000,00	
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45.274.000,00	
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000,00	
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	670.225.000,00	
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	430.225.000,00	
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	240.000.000,00	
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.156.350.000,00	
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	633.350.000,00	
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	523.000.000,00	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	85.125.881.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	85.125.881.000,00	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	45.027.787.000,00	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	15.396.318.000,00	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	650.109.000,00	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	9.675.209.000,00	
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	4.821.000.000,00	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	250.000.000,00	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.053.415.000,00	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	807.983.000,00	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	807.983.000,00	
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	812.483.000,00	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	812.483.000,00	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	812.483.000,00	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	1.607.000.000,00	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	1.607.000.000,00	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.856.000.000,00	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	2.828.500.000,00	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	204.000.000,00	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	823.500.000,00	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	12.575.000.000,00	
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	12.570.000.000,00	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	7.540.054.000,00	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.340.054.000,00	
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	200.000.000,00	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.098.094.000,00	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.871.482.000,00	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.223.482.000,00	
4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	648.000.000,00	
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	163.000.000,00	
4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	163.000.000,00	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.419.414.000,00	
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.500.000,00	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.000.000,00	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	634.904.000,00	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	56.000.000,00	
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	35.010.000,00	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	510.000.000,00	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.000.000,00	
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	830.000.000,00	
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	5.000.000,00	
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	820.000.000,00	
4.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	254.490.000,00	
4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	240.500.000,00	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.990.000,00	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	697.685.000,00	
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	384.900.000,00	
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	247.785.000,00	
4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	65.000.000,00	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	32.612.023.000,00	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	32.150.023.000,00	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	362.000.000,00	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	100.000.000,00	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	250.000.000,00	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	250.000.000,00	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		
5.01	PERENCANAAN	6.007.616.000,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	6.007.616.000,00	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	772.956.000,00	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	569.956.000,00	
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	569.956.000,00	
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40.000.000,00	
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000,00	
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	163.000.000,00	
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	163.000.000,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.148.750.000,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	448.750.000,00	
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	248.750.000,00	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.985.910.000,00	
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.030.660.000,00	
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.622.660.000,00	
5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	408.000.000,00	
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	704.000.000,00	
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	184.500.000,00	
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.000.000,00	
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	75.000.000,00	
5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	76.000.000,00	
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.500.000,00	
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000,00	
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81.250.000,00	
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.000.000,00	
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13.250.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.000.000,00	
5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000,00	
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000,00	
5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.000.000,00	
5.02	KEUANGAN	524.022.189.000,00	
5.02.0.00.0.00.28.0000	Badan Keuangan Daerah	524.022.189.000,00	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	485.281.451.000,00	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	195.000.000,00	
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	45.000.000,00	
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	150.000.000,00	
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	121.000.000,00	
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	121.000.000,00	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	484.875.451.000,00	
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	449.093.479.000,00	
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10.000.000.000,00	
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	25.781.972.000,00	
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	90.000.000,00	
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	90.000.000,00	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.413.300.000,00	
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.413.300.000,00	
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	237.500.000,00	
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	795.800.000,00	
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	250.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	130.000.000,00	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.378.880.000,00	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.378.880.000,00	
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4.296.633.000,00	
5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	457.250.000,00	
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	1.599.997.000,00	
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	25.000.000,00	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.948.558.000,00	
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.087.211.000,00	
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.090.280.000,00	
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	996.931.000,00	
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.637.100.000,00	
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000,00	
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	150.000.000,00	
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.000.000,00	
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.998.000,00	
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	415.002.000,00	
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	300.000.000,00	
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00	
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	372.100.000,00	
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.000.000.000,00	
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.02.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	5.000.000.000,00	
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.670.000,00	
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000,00	
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000,00	
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	435.670.000,00	
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	434.577.000,00	
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	213.910.000,00	
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	160.667.000,00	
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00	
5.03	KEPEGAWAIAN	35.423.998.000,00	
5.03.5.04.0.00.29.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35.423.998.000,00	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.827.030.000,00	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.146.170.000,00	
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	800.000.000,00	
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	240.300.000,00	
5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	105.870.000,00	
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	549.000.000,00	
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	9.000.000,00	
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	15.000.000,00	
5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	525.000.000,00	
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	131.860.000,00	
5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	54.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	300.000,00	
5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN	77.560.000,00	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	33.596.968.000,00	
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.676.038.000,00	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.486.438.000,00	
5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	189.600.000,00	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	679.440.000,00	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.635.000,00	
5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.805.000,00	
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.994.000,00	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000,00	
5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	125.006.000,00	
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000,00	
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.490.000,00	
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000,00	
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95.000.000,00	
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.990.000,00	
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.000.000,00	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000,00	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00	
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.204.420.000,00	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.204.420.000,00	
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	3.204.420.000,00	
5.04.02.2.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	150.000.000,00	
5.04.02.2.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.311.100.000,00	
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.743.320.000,00	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	900.000.000,00	
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	900.000.000,00	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.148.750.000,00	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	250.000.000,00	
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	230.000.000,00	
5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	20.000.000,00	
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	300.000.000,00	
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	75.000.000,00	
5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	75.000.000,00	
5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	150.000.000,00	
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	150.000.000,00	
5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	75.000.000,00	
5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	75.000.000,00	
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	448.750.000,00	
5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100.000.000,00	
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	100.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	8.948.013.000,00	
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	8.948.013.000,00	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	123.167.000,00	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	123.167.000,00	
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	96.039.000,00	
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	27.128.000,00	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	346.900.000,00	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	346.900.000,00	
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	200.000.000,00	
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	146.900.000,00	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.477.946.000,00	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.874.121.000,00	
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.739.121.000,00	
6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.000.000,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	481.000.000,00	
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000,00	
6.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	35.000.000,00	
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.000.000,00	
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.325.000,00	
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.325.000,00	
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49.000.000,00	
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	69.500.000,00	
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00	
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.500.000,00	
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000,00	
7	UNSUR KEWILAYAHAN		
7.01	KECAMATAN	68.242.185.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Boyolali	5.126.237.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	88.477.500,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	88.477.500,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	43.477.500,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.862.759.500,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.518.676.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.410.676.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	247.583.500,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.011.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.316.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.003.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.756.500,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	22.373.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	115.970.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.154.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.000.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.200.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.500.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.500.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.0.00.0.00.01.0002	Kelurahan Banaran	904.228.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	250.000.000,00	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	250.000.000,00	
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	250.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	332.642.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	332.642.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	332.642.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	311.586.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	61.776.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	61.776.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.910.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.030.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.470.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	83.810.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.600.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.400.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.100.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	62.500.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.500.000,00	
7.01.0.00.0.00.01.0004	Kelurahan Siswodipuran	965.628.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	350.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	350.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	350.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Musuk	2.466.330.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	70.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.246.330.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.985.989.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.958.989.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.941.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	96.941.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.400.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29.500.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Banyudono	2.694.611.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	80.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	80.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	66.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	66.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.473.611.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.094.361.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.959.361.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	240.000.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	60.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	90.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	46.200.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.300.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.050.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.050.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Teras	2.573.002.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	60.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	60.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	60.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	80.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	80.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.358.002.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.084.002.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.030.002.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	177.501.400,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.501.400,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	105.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.498.600,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.600.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	998.600,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Sawit	2.483.066.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.248.066.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.954.886.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.900.886.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	200.530.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	95.530.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.650.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.150.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Sambu	2.520.899.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59.002.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	59.002.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	35.002.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	24.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.336.897.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.079.068.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.971.068.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.419.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.998.900,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.999.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.002.100,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	89.419.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.900.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.510.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.510.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Ngemplak	2.829.121.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	59.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	59.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	29.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.595.121.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.220.621.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.166.621.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.500.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.500.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	38.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	12.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	150.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	63.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.500.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Simo	2.393.836.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.500.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.500.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20.500.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	20.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.228.336.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.948.060.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.894.060.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	187.600.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94.600.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.400.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	32.300.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.276.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.256.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.020.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	35.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Nogosari	2.933.490.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	94.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	94.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	44.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	50.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.714.490.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.439.490.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.357.890.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.600.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	197.020.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.020.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	112.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.990.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	990.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.990.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.050.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.940.000,00	
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Klego	3.092.229.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	65.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.902.229.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.582.154.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.474.154.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	108.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.060.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.990.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	21.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.070.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	31.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.880.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.480.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.500.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.135.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.135.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Andong	2.696.377.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	70.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	70.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	70.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	25.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	25.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	70.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	70.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	45.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	25.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.431.377.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.182.205.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.101.205.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	159.172.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.509.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.988.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.003.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	77.672.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.500.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.500.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.500.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.700.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.800.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Wonosegoro	2.725.855.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	64.500.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	64.500.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	32.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	32.500.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.486.355.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.155.714.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.128.714.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	27.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.100.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.500.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.500.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.960.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	59.060.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.581.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.300.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.281.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	35.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Karanggede	2.642.175.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	50.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	69.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	29.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.448.175.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.156.975.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.075.975.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	185.300.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	96.800.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.900.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Kemusu	2.824.708.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	62.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	22.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.587.708.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.281.578.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.227.578.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.730.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.250.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	83.480.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54.400.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.600.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	900.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Juwangi	3.023.923.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	62.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	62.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	32.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.786.923.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.348.197.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.267.197.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	275.895.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.400.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.500.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	28.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	144.995.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.831.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.631.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.16.0002	Kelurahan Sambeng	681.433.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	300.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	300.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	300.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	107.521.800,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	90.112.800,00	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.980.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	85.132.800,00	
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	17.409.000,00	
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	17.409.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	40.611.200,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	40.611.200,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40.611.200,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	233.300.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	54.000.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.100.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.600.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.500.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.000.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	9.000.000,00	
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.200.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.600.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Ampel	2.363.295.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	80.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	80.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.148.295.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.878.745.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.797.745.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	218.463.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.013.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	114.450.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.087.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.300.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.800.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	987.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	43.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.18.0000	Kecamatan Cepogo	3.031.566.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	90.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	90.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	59.100.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.900.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.766.566.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.442.159.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.307.159.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	250.160.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	25.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	141.160.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.800.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.300.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.447.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.947.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.19.0000	Kecamatan Selo	2.792.830.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	35.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	35.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	35.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	73.100.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	73.100.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	43.100.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.609.730.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.314.942.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.179.942.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	135.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.800.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.500.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	86.300.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.058.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.100.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	958.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.930.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.930.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.20.0000	Kecamatan Gladagsari	2.478.354.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	69.325.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	69.325.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	41.840.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	27.485.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.234.029.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.905.495.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.824.495.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	222.247.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.524.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	16.539.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	91.184.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.887.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	987.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.400.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.400.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.21.0000	Kecamatan Tamansari	2.548.967.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	80.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	80.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	80.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	60.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	60.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	30.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	30.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.333.967.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.009.727.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.928.727.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	229.040.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	16.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	121.040.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.200.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	43.200.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000,00	
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.22.0000	Kecamatan Wonosamodro	2.725.092.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	80.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	30.000.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.000.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	65.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	65.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	40.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.470.092.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.319.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.153.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	31.580.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	980.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.000.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.847.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.137.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.710.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,00	
7.01.0.00.0.00.23.0000	Kecamatan Mojosongo	3.960.274.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	100.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	72.129.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	72.129.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	40.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	32.129.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.713.145.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.444.320.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.390.320.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	54.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.115.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.500.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	94.815.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.600.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	4.600.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	33.600.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	31.500.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.200.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	42.510.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.510.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.2.08.1.05.01.0003	Kelurahan Pulisen	968.695.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	250.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	250.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	250.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	436.680.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	436.680.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	436.680.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.600.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.600.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	21.600.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	260.415.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	91.887.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91.887.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	108.287.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.708.000,00	
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.400.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.687.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6.048.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.800.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	6.999.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	70.478.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.167.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.280.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.680.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.961.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.691.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.270.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	
7.01.2.08.1.05.01.0004	Kelurahan Siswodipuran	965.628.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	397.800.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	397.800.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	397.800.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.300.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.300.000,00	
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1.300.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	216.528.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.664.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.664.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	106.400.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	64.400.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.964.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.464.000,00	
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.500.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.500.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	40.000.000,00	
7.01.2.19.8.01.02.0000	Kecamatan Musuk	2.466.330.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.2.19.8.01.03.0002	Kelurahan Mojosongo	872.464.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	245.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	245.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	245.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	354.400.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	354.400.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	354.400.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.000.000,00	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.000.000,00	
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000,00	
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	6.000.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	242.064.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.764.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	64.764.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.290.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.208.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	23.182.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	66.900.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10.000.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.410.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	11.660.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.750.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22.900.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	900.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.000.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24.700.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	900.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.000.000,00	
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.800.000,00	
7.01.2.19.8.01.03.0003	Kelurahan Kemiri	923.500.000,00	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	250.000.000,00	
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	250.000.000,00	
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	250.000.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	431.400.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	25.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	25.000.000,00	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	406.400.000,00	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	406.400.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	242.100.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	63.360.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	63.360.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	134.940.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.000.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.000.000,00	
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.232.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.152.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	79.500.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.056.000,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.500.000,00	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	12.500.000,00	
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.300.000,00	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000,00	
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.800.000,00	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.000.000,00	
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000,00	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000,00	
7.01.2.19.8.01.06.0000	Kecamatan Sawit	2.483.066.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	75.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.2.19.8.01.11.0000	Kecamatan Klego	3.092.229.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	75.000.000,00	
7.01.2.19.8.01.13.0000	Kecamatan Wonosegoro	2.725.855.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.486.355.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	204.100.000,00	
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	102.100.000,00	
7.01.2.19.8.01.14.0000	Kecamatan Karanggede	2.642.175.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	15.000.000,00	
7.01.2.19.8.01.15.0000	Kecamatan Kemusu	2.824.708.000,00	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.000.000,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.000.000,00	
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50.000.000,00	
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	25.000.000,00	
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000,00	
7.01.2.19.8.01.19.0000	Kecamatan Selo	2.792.830.000,00	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.609.730.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	186.800.000,00	
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	
7.01.2.19.8.01.22.0000	Kecamatan Wonosamodro	2.725.092.000,00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.129.346.000,00	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.048.346.000,00	
7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.000.000,00	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	226.319.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57.988.000,00	
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.012.000,00	
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	18.000.000,00	
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	118.166.000,00	
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.000.000,00	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.641.321.000,00	
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.641.321.000,00	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	716.635.000,00	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	716.635.000,00	
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	716.635.000,00	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.306.600.000,00	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1.306.600.000,00	
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.306.600.000,00	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	1.631.600.000,00	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.631.600.000,00	
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1.631.600.000,00	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	356.600.000,00	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	356.600.000,00	
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	356.600.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	97.200.000,00	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	97.200.000,00	
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4.000.000,00	
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	93.200.000,00	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.532.686.000,00	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.509.186.000,00	
8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.428.186.000,00	
8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	81.000.000,00	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.200.000,00	
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000,00	
8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00	
8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000,00	
8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	70.000.000,00	
8.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	71.900.000,00	
8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	421.300.000,00	
8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.000.000,00	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.800.000,00	
8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.350.000,00	
8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.000.000,00	
8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.450.000,00	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	108.500.000,00	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			
1	2	3	4
8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	50.000.000,00	
8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.500.000,00	
8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000,00	